

**ASPEK POLITIK DAN KEAMANAN DALAM KONFLIK  
DI LAUT CINA SELATAN**



*Disusun Oleh :*

*Yulia Permatasari*

*E 131 076 04*

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2011

## HALAMAN PENGESAHAN



JUDUL : ASPEK POLITIK DAN KEAMANAN KONFLIK DI LAUT CINA SELATAN

NAMA : YULIA PERMATASARI

NIM : E 131 07 604

JURUSAN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS: ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, Desember 2011

Mengetahui

Pembimbing I,

Drs. Patrice Lumumba, MA  
NIP. 19611012 198701 1 001

Pembimbing II,

Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si  
NIP. 19710109 200801 2 005

Mengesahkan

Ketua Jurusan,



Dr. H. Adi Suryadi Culla, MA

NIP. 19630217 199202 1 001

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : ASPEK POLITIK DAN KEAMANAN KONFLIK DI LAUT CINA SELATAN

NAMA : YULIA PERMATASARI

NIM : E 131 07 604

JURUSAN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS: ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 27 Desember 2011.

### TIM EVALUASI

Ketua : Drs. Patrice Lumumba, MA

Sekretaris : Muh. Ashry Sallatu, S.IP, M.Si

Anggota : 1. Dr. H. Adi Suryadi Culla, MA

2. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

3. Burhanuddin, S.IP, M.Si



Handwritten signatures of the evaluation team members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background with horizontal dotted lines below each name.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi'l alamin*, segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan ridho-Nya memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "ASPEK POLITIK DAN KEAMANAN DALAM KONFLIK DI LAUT CINA SELATAN". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda **Rasulullah saw**

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Studi pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, ucapan terimakasih yang tak terhingga wajib saya berikan kepada Ayahanda **Drs.Lantu M.Eng.Sc.DESS**, dan Ibunda **Sari Winarningsih** atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan moril maupun materil, kritik dan saran serta doa yang tak henti-hentinya buat Ananda tercinta. Buat adik-adikku **Novita Kumala Putri, Indah Nurhikmah, dan Muh. Taufik Dwi Putra** terimakasih atas dukungan kalian.

Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Drs. Patrice Lumumba M.A.** selaku pembimbing pertama, Ibu **Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si** selaku pembimbing kedua sekaligus Penasehat Akademik yang meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat serta memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan sudah banyak memberikan nasehat selama penulis menempuh studi.
2. Bapak **Burhanuddin, S.IP, M.Si**, **Muh. Ashry Sallatu, S.IP, M.Si** sebagai tim penguji pada saat melaksanakan seminar hasil Hubungan Internasional.
3. Bapak **Dr. H. Adi Suryadi Culla, MA.** sebagai Ketua Jurusan Hubungan Internasional sekaligus tim penguji pada saat melaksanakan seminar Hubungan Internasional, serta seluruh staf dosen pengajar dan pegawai Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNHAS yang telah memberikan bimbingan serta ilmu selama penulis menjalani studi hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Ibu-ibu staf pegawai jurusan Hubungan Internasional FISIP UNHAS
5. Bapak dan Ibu staf pegawai akademik FISIP UNHAS.

6. Kepada saudara-saudaraku tercinta FISIP'07 (Tak Sekedar Kata) : Ilham, Hasrul Eka Putra, Angy Honieta Djoha, Hije, Myta Fitria.W, Munawir Akhmad, Indah Jelita, Irna Farina, Isti Paramita, A.Nur Hidayati, Yunita Yudis, Anugrah, Fidya, Eka, Diby, Septi W, Aswin Udin Setiawan, Andi Dirga, Pandu.P, Mawardin, Irma Basri, Linda, Acha Cangara, Sudarmono, Ulil Amri, A. Jaya Bakrie, Abdullah Kudus, A. Tenri Asari, Ari, Egha, Lia Mamonto, Awal, Markoni, Edy, Nando, Mirsa, serta teman-teman FISIP yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu dan dan telah berbagi banyak kisah. Terimakasih semuanya. ☺
7. Serta buat seseorang yang special **Fery Rahmat B** sudah banyak membantu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini dalam menyelesaikan skripsiku. ☺
8. Kepada teman-temanku, **Arha, Bogel, Nando, Ahya, Danang, Mizwar, Whany, Putri Fatima**, dan teman-teman lain yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu.
9. Adik-adik Hubungan Internasional yang sudah membantu dalam pembuatan skripsi.
10. Warga HIMAHI-FISIP (Himpunan Mahasiswa Hi)

Serta kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas segala perhatian dan bantuannya selama ini. Semoga *Allah Swt* membalas jasa-jasa kalian. Amin.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan terutama bagi penulis. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Makassar, 17 Februari 2012

Penulis

## ABSTRAKSI

Skripsi yang berjudul “ Aspek Politik dan Keamanan dalam Konflik di Laut Cina Selatan” yang disusun oleh Yulia Permatasari (E 131 076 04) di bawah bimbingan Patrice Lumumba sebagai pembimbing I, dan Pusparida Syahdan, Sebagai pembimbing II.

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai Aspek Politik dan Keamanan dalam konflik di Laut Cina Selatan, dan indikator-indikator yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut yang hingga saat ini masih terus berkembang. Disamping itu juga untuk memaparkan upaya-upaya menanggulangi konflik tersebut dengan cara menganalisa fenomena-fenomena yang ada. Tipe penelitian dalam tulisan ini mengacu pada penelitian historis dan deskriptif analisis yang memanfaatkan data yang telah ada untuk menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis. Dalam menganalisis permasalahan, analisis data kualitatif dikembangkan dengan cara membandingkan sehingga akan menghasilkan analisis yang sifatnya relatif dalam mengambil suatu kesimpulan. Sedangkan untuk mengarahkan pemaparan pokok-pokok pembahasan dilakukan dengan tehnik penulisan deduktif-induktif. Tingginya dinamika interaksi di Laut Cina Selatan menunjukkan besarnya kapabilitas ekonomi, politik, dan militer di kawasan ini.

Adapun hasil dari penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara seperti Republik Rakyat Cina (RRC), Vietnam, dan Filipina, menimbulkan implikasi-implikasi Politis dan Keamanan yang diakibatkan oleh adanya pergesekan kepentingan di antara ketiga negara tersebut, tedapat saling klaim demi kepentingan masing-masing negara.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM EVALUASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Konsep tentang Politik.....	17
B. Konsep tentang Keamanan.....	19
C. Konsep tentang Konflik .....	21
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LAUT CINA SELATAN DAN MASALAH POLITIK DAN KEAMANAN DALAM KONFLIK DI LAUT CINA SELATAN.....</b>	<b>29</b>
A. Laut Cina Selatan.....	29
1. Profil Laut Cina Selatan.....	29
2. Ruang Lingkup Laut Cina Selatan.....	33
B. Masalah Politik dan Keamanan.....	36
1. Sumber masalah Politik dan Keamanan.....	36
2. Substansi masalah Politik dan Keamanan .....	40
<b>BAB IV ESENSI POLITIK DAN KEAMANAN KONFLIK DI LAUT CINA SELATAN.....</b>	<b>43</b>
A. Aspek Politik konflik di Laut Cina Selatan.....	43
B. Aspek Keamanan konflik di Laut Cina Selatan.....	55

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS HASANUDDIN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Laut Cina Selatan merupakan bagian dari samudra pasifik, yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3.5 juta km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Berdasarkan ukurannya, Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudra. Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional.

Secara geografis Laut Cina Selatan terbentang dari arah barat daya ke Timur Laut, yang batas Selatannya 3° Lintang Selatan antara Sumatra Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata), dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Cina Daratan. Laut Cina Selatan terletak di Sebelah Selatan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan; di sebelah barat Filipina; di sebelah barat, Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia; di sebelah Timur Laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan di sebelah Timur Vietnam.

---

<sup>1</sup> "Laut Cina Selatan" [www.anneahira.com/laut-cina-selatan.htm](http://www.anneahira.com/laut-cina-selatan.htm). Diakses tanggal 25 juni 2010

Di Laut ini, ada lebih dari 200 pulau dan karang yang diidentifikasi, kebanyakan darinya di daerah Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly tersebar seluas 810 sampai 900 km yang meliputi beberapa 175 fitur insuler yang diidentifikasi, yang terbesarnya menjadi Kepulauan Taiping (Itu Aba) yang panjangnya 1,3 km dan dengan ketinggian 3,8 m. Pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan, yang membentuk kepulauan, jumlahnya mencapai ratusan. Laut dan pulau-pulau yang sebagian besar tidak berpenghuni tersebut di klaim oleh beberapa negara, klaim tersebut jelas tercermin pada beragam nama yang digunakan untuk menyebut pulau-pulau dan laut tersebut.

Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan adalah (searah jarum jam dari utara) Republik Rakyat Cina (RRC) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik Cina (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut Cina Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong), Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig.<sup>2</sup>

Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi geografis yang sangat besar. Sumber daya alam yang dimiliki Laut Cina Selatan berupa minyak bumi dan gas alam yang terkandung di dalamnya dengan jumlah yang cukup besar, serta memiliki potensi geografis, karena kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional (jalur lintas laut perdagangan internasional). Kawasan ini juga banyak dilalui oleh Armada Angkatan Laut, baik berupa kapal tangker maupun Armada Angkatan

---

<sup>2</sup> *ibid*

Laut dari negara-negara maju, seperti dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea yang melintasi laut itu.

Kawasan Laut Cina Selatan bila dilihat dalam tata Lautan Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis. Sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama. Dengan kata lain, kawasan Laut Cina Selatan yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat didalamnya, serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan kawasan Laut Cina Selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun.

Hal ini dapat diketahui sejak tahun 1947 hingga saat ini tahun 2011.<sup>3</sup> Dimana terdapat pertikaian atau saling klaim antara negara yang mengaku memiliki dasar kepemilikan berdasarkan batas wilayah laut atau perairan, seperti Republik Rakyat Cina (RRC), Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Selain saling klaim di antara negara-negara yang berlokasi di perairan Laut Cina Selatan tersebut, juga terdapat kepentingan-kepentingan negara-negara besar seperti : Amerika Serikat, Rusia, negara-negara Eropa Barat, Jepang, Korea, Taiwan dalam hal keperluan pelayaran dan keperluan kandungan-kandungan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang terkandung di dalam wilayah Laut Cina Selatan tersebut.

---

<sup>3</sup> KOMPAS edisi, Selasa 21 Juni 2011 *Singapura Desak Cina Jelaskan Klaim*. Diakses tanggal 21 November 2011

Laut Cina Selatan terbentuk sebagai sebuah kepulauan. Dimana, benih-benih perselisihan yang terdapat di Lautan itu, banyak di sebabkan oleh latar belakang historis, baik dari segi penamaan terhadap lautan itu maupun batas-batas kepemilikannya. Dalam hal penamaan misalnya, Republik Rakyat China (RRC), menyebutnya dengan nama *Laut Selatan* saja. Filipina, menyebutnya dengan nama *Laut Luzón* (Laut Filiphina Barat), karena keberatan dengan nama Laut Cina Selatan, sebab seolah-olah kawasan itu milik Republik Rakyat Cina (RRC). Sedangkan Vietnam menyebutnya dengan nama *Laut Timur*. Dari beberapa negara yang mengklaim Laut Cina Selatan, diketahui Republik Rakyat Cina (RRC) dan Vietnam adalah yang begitu gencar dalam mempertahankan kawasan ini.

Perairan Laut Cina Selatan, di klaim oleh sejumlah negara. Republik Rakyat Cina (RRC) berebut kepulauan Sparty dengan Brunei, Filiphina, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan. Sementara itu, kepulauan Paracel di klaim oleh Republik Rakyat Cina (RRC), Taiwan, dan Vietnam. Ditelusuri dari akar permasalahannya, konflik yang sebenarnya adalah mengenai klaim-klaim di wilayah perairan dan kepulauan di kawasan Laut Cina Selatan yang terjadi mulai sejak Desember tahun 1947 dan terus berlanjut hingga saat ini tahun 2011.<sup>4</sup> Di dalam kawasan Laut Cina Selatan terdapat kepulauan Sparty dan Paracel yang tergolong titik rawan titik rawan dalam soal klaim teritorial. Kepulauan Sparty dan kepulauan Paracel adalah yang menjadi fokus perebutan antara negara-negara pengklaim

---

<sup>4</sup> "Mencermati Sengketa Teritorial Laut Cina Selatan"

<http://judiono.wordpress.com/2009/01/05/mencermati-sengketa-teritorial-laut-cina-selatan/htm>,

Diakses tanggal 05 januari 2011

(*claimants*). Tetapi yang lebih di sorot adalah kepulauan Sparty yang kemudian menjadi isu dominan Internasional.<sup>5</sup>

Pada Desember 1947 Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan dengan menerbitkan peta yang tidak hanya memuat kepulauan-kepulauan utama di wilayah Laut Cina Selatan, tetapi juga memberi tanda sebelas garis putus-putus (yang juga di sebut garis-garis berbentuk huruf U) di seputar wilayah perairan Laut Cina Selatan. Pihak Republik Rakyat Cina (RRC) mengklaim saat peta tersebut diterbitkan pertama kali tidak ada satupun negara yang menyampaikan protes diplomatik, sehingga terus digunakan pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC), sejak setelah kemenangan Partai Komunis 1949. Meski demikian, Republik Rakyat Cina (RRC) tidak pernah secara terbuka menyatakan detail klaimnya tersebut. Pada tahun 1976 pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) secara paksa mengambil alih dan menguasai kepulauan Paracel dari Vietnam. Kepulauan itu berada di sebelah Utara kepulauan Sparty. Keduanya sama-sama di yakini kaya akan sumber daya alam gas dan minyak bumi.<sup>6</sup>

Sengketa teritorial di Laut Cina Selatan, khususnya sengketa atas kepemilikan kepulauan Sparty dan kepulauan Paracel mempunyai riwayat yang panjang. Berawal dari konflik yang disebabkan oleh klaim-klaim mengenai perbatasan di wilayah perairan dan kepulauan di Laut Cina Selatan. Sejarah menunjukkan bahwa, penguasaan kepulauan ini telah melibatkan banyak negara di antaranya Inggris,

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> KOMPAS edisi, Selasa 21 Juni 2011. Op. cit

Perancis, Jepang, Republik Rakyat Cina (RRC), Vietnam, yang kemudian melibatkan pula Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Taiwan.

Sengketa teritorial dan penguasaan kepulauan di Laut Cina Selatan. Diawali oleh tuntutan Republik Rakyat Cina (RRC) atas seluruh pulau-pulau di kawasan Laut Cina Selatan yang mengacu kepada catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Menurut Republik Rakyat Cina (RRC) sejak 2000 tahun yang lalu, Laut Cina Selatan telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka. Namun Vietnam membantahnya dan menganggap kepulauan Spartly dan Paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya. Vietnam menyebutkan kepulauan Spartly dan Paracel secara efektif di dudukinya sejak abad ke-17 ketika kedua kepulauan itu tidak berada dalam penguasaan suatu negara.

Dalam perkembangannya, Vietnam tidak mengakui wilayah kedaulatan Republik Rakyat Cina (RRC) di kawasan tersebut, sehingga pada saat perang dunia II berakhir Vietnam Selatan menduduki kepulauan Paracel, termasuk beberapa gugus di kepulauan Spartly. Selain Vietnam Selatan kepulauan Spartly juga diduduki oleh Taiwan sejak perang dunia II dan Filipina tahun 1971, alasan Filipina menduduki kepulauan tersebut karena kawasan itu merupakan tanah yang sedang tidak dimiliki oleh negara manapun. Filipina juga menunjuk perjanjian San-Fransisco 1951, yang antara lain menyatakan, Jepang telah melepas haknya terhadap kepulauan Spartly. Malaysia juga menduduki beberapa gugus kepulauan Spartly yang di namai terumbu layang. Menurut Malaysia, langkah itu di ambil berdasarkan peta batas landasan kontinen Malaysia tahun

1979, yang mencakup sebagian dari kepulauan Spartly. Sementara Brunei yang memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Inggris juga 1 Januari 1984 kemudian juga ikut mengklaim, namun Brunei hanya mengklaim perairan dan bukan gugus pulau. Sampai saat ini negara yang aktif menduduki di sekitar kawasan ini adalah Taiwan, Vietnam, Filipina dan Malaysia. Dengan kondisi seperti ini, masalah penyelesaian sengketa teritorial di Laut Cina Selatan tampaknya akan menjadi semakin rumit dan membutuhkan mekanisme pengolahan yang lebih berhati-hati.<sup>7</sup>

Dimulai pada tahun 1988 ketegangan terjadi di kepulauan Spartly, Vietnam dan Republik Rakyat Cina (RRC) berperang di Lautan memperebutkan gugusan batu karang Johnson (Johnson South Reef). Saat itu Angkatan Laut Vietnam di halang-halangi oleh dua puluh kapal perang milik Republik Rakyat Cina (RRC) yang sedang berlayar di Laut Cina Selatan, sehingga terjadi bentrokan yang mengakibatkan kurang lebih sebanyak 70 prajurit Angkatan Laut Vietnam tewas. Sengketa perbatasan yang memicu perang besar juga terjadi di perbatasan darat kedua negara pada tahun 1979 dan 1984. Selain itu juga seperti yang terjadi antara Republik Rakyat Cina (RRC) dan Vietnam yakni pendudukan Republik Rakyat Cina (RRC) atas Karang Mischief 1995, dan baku tembak antara kapal perang Republik Rakyat Cina (RRC) dan Filipina didekat pulau Campones 1996, menunjukkan sengketa tersebut bisa tersulut menjadi konflik terbuka sewaktu-waktu.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> "Konflik Laut Cina Selatan" [Johnpau.com/2010/11/09/91htm](http://Johnpau.com/2010/11/09/91htm), Diakses tanggal 09 November 2010

<sup>8</sup> KOMPAS edisi, Selasa 21 Juni 2011. Op.Cit

Sampai saat ini konflik klaim tumpang tindih yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan masih terus berlangsung dan menjadi perdebatan antara beberapa negara di kawasan ASEAN melalui perundingan diplomasi. Diketahui pada tanggal 15 juni 2011, kapal patroli maritim milik Republik Rakyat Cina (RRC), Haixun 31, berlabuh di Singapura setelah berangkat dari Republik Rakyat Cina (RRC). Dalam perjalanannya diketahui kapal itu telah melewati perairan di sekitar kepulauan Paracel dan Spartly, yang menjadi sumber sengketa di Laut Cina Selatan.<sup>9</sup>

Namun sebelumnya pekan lalu Vietnam juga telah menggelar latihan perang amunisi tajam selama beberapa jam di perairan Laut Cina Selatan, yang juga di klaim oleh Republik Rakyat Cina (RRC). Latihan ini sudah direncanakan menyusul konflik terbaru dengan Republik Rakyat Cina (RRC) terkait sengketa di Spartly dan Paracel, pihak Vietnam menegaskan bahwa latihan ini hanya latihan rutin tahunan. Latihan ini berlangsung selama sembilan jam di sekitar *Hon Ong*, pulau tak berpenghuni, terletak sekitar 250 km dari Paracel dan hampir 1.000 kilometer dari Spartly. Sengketa dan perseteruan antara negara pengklaim semakin ramai dengan aksi saling unjuk kebolehan dan kemampuan. Bulan depan Vietnam dijadwalkan kembali akan berlatih perang, kali ini bersama Angkatan Laut Amerika Serikat. Seolah tidak mau kalah, militer Republik Rakyat Cina (RRC) juga telah mengumumkan rencana rangkaian latihan perang lepas pantainya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid

Republik Rakyat Cina (RRC) menantang Vietnam untuk perang, hal ini di latar belakang atas kemarahan Republik Rakyat Cina (RRC) dengan sikap Vietnam yang menyambut baik keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Cina Selatan. Republik Rakyat Cina (RRC) dipastikan akan menguji coba kapal induk buaatannya, yang akan berlayar mulai 1 juli, bersamaan dengan peringatan 90 tahun Partai Komunis. Militer Republik Rakyat Cina (RRC) mengakui uji coba itu sekaligus menjadi efek penggetar dengan menunjukkan kemampuan dan kekuatan Angkatan Laut Republik Rakyat Cina (RRC). Amerika Serikat juga getol ingin terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan dengan alasan ingin menjamin kebebasan navigasi di perairan itu. Menurut McCain, yang adalah mantan perwira menengah Angkatan Laut Amerika Serikat, Washington harus memperluas dukungan politik dan militernya ke negara-negara Asia Tenggara serta memperkuat barisan menghadapi Republik Rakyat Cina (RRC). Menurutnya Republik Rakyat Cina (RRC) selalu mencari dan mencoba mengeksploitasi perpecahan yang memang sudah ada di dalam ASEAN. Mereka mempermainkan kondisi itu untuk kemudian menekan negara-negara terkait demi agenda kepentingan dan keuntungan Republik Rakyat Cina (RRC) sendiri.

Amerika Serikat dan Vietnam mengeluarkan seruan bersama tentang resolusi damai dalam penuntasan sengketa di Laut Cina Selatan. Namun, Amerika Serikat menegaskan tidak akan mengambil posisi tertentu dalam sengketa Laut Cina Selatan. McCain menegaskan, Amerika Serikat selama ini menyambut baik hubungan kerja sama dengan Republik Rakyat Cina (RRC) dan sama sekali tidak ingin mencari konflik. Akan tetapi Amerika Serikat juga mempertanyakan

perilaku agresif Republik Rakyat Cina (RRC) dan klaim teritorialnya yang tidak bisa dibenarkan.<sup>11</sup>

Melihat situasi yang semakin rumit, maka ASEAN mulai bertindak dan ikut turun tangan menanggapi persoalan klaim teritorial yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan. Karena jika konflik ini tidak ditanggapi dengan serius dan dibiarkan begitu saja maka segala bentuk kerjasama di kawasan Laut Cina Selatan bisa kehilangan daya dukung dan tidak berkelanjutan selain itu juga dapat mengancam keaman negara-negara ASEAN, dan sekitarnya.<sup>12</sup> Sepuluh negara anggota ASEAN sepakat mempercepat proses implementasi perilaku yang harus menjadi pegangan sejumlah negara yang terlibat sengketa Laut Cina Selatan. Yakni dengan diadakannya *Declaration on the Conduct of Parties* (DOC) yaitu hukum yang mengikat pihak-pihak yang bertikai. ASEAN juga menunjukkan keinginan untuk memulai penyusunan dan pembahasan kode etik DOC, yang kemudian akan dibahas dengan Republik Rakyat Cina (RRC) dan diterapkan di wilayah perairan itu.<sup>13</sup>

Aktor yang berperan didalamnya tidak hanya Vietnam dan Republik Rakyat Cina (RRC), tetapi juga melibatkan beberapa negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia dan Filipina, serta Taiwan. Klaim-klaim tersebut bisa berdasarkan klaim atas sejarah yang beraneka ragam, konsiderasi ekonomi, serta pertimbangan geostrategis negara-negara yang terlibat. Selain itu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

<sup>11</sup> KOMPAS edisi, Rabu 22 Juni 2011 *Cina Tantang Vietnam Perang*. Diakses tgl 05 oktober 2011

<sup>12</sup> KOMPAS edisi, Rabu 1 juni 2011 *Isu Laut Cina Selatan Harus Dituntaskan*. Diakses tgl 10 oktober 2011

<sup>13</sup> KOMPAS edisi, Kamis 9 juni 2011 *Laut Cina Selatan Dibahas*. Diakses tgl 11 oktober 2011

dari hampir semua negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, saling tumpang tindih, sehingga menimbulkan masalah dalam penentuan batas.



Kenyataannya terjadi perang klaim dan upaya-upaya penguasaan atas kawasan Laut Cina Selatan. Kepemilikan sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan memperbesar masalah ini sehingga menimbulkan ketegangan tentang hak atas Laut Teritorial atau Landasan Kontinen. Persoalannya menjadi semakin kursial karena klaim-klaim tersebut saling tumpang tindih yang disebabkan karena masing-masing negara mengklaim kepemilikannya yang berdasarkan versinya sendiri, baik secara historis maupun secara legal formal (tertulis), demi kepentingan masing-masing negara.<sup>14</sup>

#### **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian mengenai aspek Politik dan Keamanan Laut Cina Selatan yang pada umumnya dapat berawal dan berakhir pada tahun tertentu, namun penulis membatasi masalah aspek Politik dan Keamanan Laut Cina Selatan pada tahun 1947 sampai dengan tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik di Laut Cina Selatan ?
2. Bagaimana aspek Politik dan Keamanan di Laut Cina Selatan ?

<sup>14</sup> "Diplomasi ASEAN dalam Upaya Menyelesaikan Konflik."

<http://sahidpram.posterous.com/diplomasi-asean-dalam-upaya-menyelesaikan-kon>, Diakses tanggal 24 may 2009

### **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui latar belakang terjadinya konflik di Laut Cina Selatan.
- b. Mengetahui aspek Politik dan Keamanan di Laut Cina Selatan.
- c. Mengetahui solusi dalam penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Apabila penelitian tersebut dapat tercapai, maka penelitian tersebut :

- a. Diharapkan bagi para pengambil kebijakan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan acuan untuk mengetahui aspek Politik dan Keamanan di Kawasan Laut Cina Selatan.
- b. Diharapkan bagi para akademisi, dapat menjadikan fenomena tersebut sebagai bahan untuk melahirkan gagasan baru dalam penyelesaian konflik sebagaimana Laut Cina Selatan.

### **D. Kerangka Konseptual**

Mencermati konflik Laut Cina Selatan maka perlu dipilah akan aspek-aspek apa yang ada di dalamnya agar dalam mengidentifikasi masalah sengketa dan mengambil kebijakan dapat lebih mudah. Dalam fenomena sengketa Laut Cina Selatan terkadang tidak dapat dipisahkan oleh adanya motif ekonomi di mana Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya alam. Namun dalam mencapai kepentingan ekonomi tersebut para aktor atau negara-negara yang ada di dalamnya menggunakan politik sebagai instrumen. Hal ini, jika dilihat dari segi

wilayah, konflik Laut Cina Selatan memang merupakan konflik teritorial yang bersifat *zero sum game* di mana kemenangan satu pihak adalah kerugian pihak lain. hal ini tentu saja berimbas pada aspek keamanan. Dengan demikian, penulis berupaya mengkaji aspek politik dan keamanan dalam sengketa Laut Cina Selatan dengan menggunakan konsep politik dan konsep keamanan. Selain itu judul ini juga berkaitan dengan konsep konflik, dimana penulis ingin mengkaji tentang aspek Politik dan Keamanan dalam konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan.

Politik Internasional menurut J.Holsti adalah study mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain mencakup unsur power, kepentingan, dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional, *deterrence*, dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik. Politik Internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu dengan berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara serta kesatuan-kesatuan politik lainnya.<sup>15</sup>

Kemanan secara etimologi konsep keaman (*security*) berasal dari bahasa latin "*securus*" (*se + cura*) yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (*free from danger, free from fear*). Kata ini juga bisa bermakna dari gabungan kata *se* (yang berarti tanpa / *without* ) dan *curus* ( yang berarti 'uneasi-

---

<sup>15</sup> Anak Agung Banyu Perwita an Y.M.Yani 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* . Bandung: Rosda Karya. Hal. 40

ess). Sehingga bila di gabungkan kata ini bermakna '*liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risks or threats*'.<sup>16</sup>

Menurut Walter Lippman, Keamanan adalah *a nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, if challenged, to maintain them by victory in such a war.*<sup>17</sup> Walter Lippmann merangkum kecenderungan ini dengan menyatakan bahwa suatu negara berada dalam keadaan aman selama negara itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting dan dapat menghindari perang atau jika terpaksa harus melakukan peperangan dapat keluar sebagai pemenang.<sup>18</sup>

Selain dari konsep yang disebutkan diatas, dimasukkan juga konsep konflik yang erat hubungan dengan permasalahan di Laut Cina Selatan. Konflik sebagai suatu fenomena tidak akan pernah absen dari percaturan Politik Internasional selama interaksi antar negara di dunia masih berlangsung disertai dengan perbedaan-perbedaan yang ada yang kemudian bisa memicu timbulnya konflik.

Menurut penganut paradigme realis, politik antar bangsa itu hakikatnya adalah pertarungan perebutan kekuasaan (*struggle for power*). Dengan konsep kepentingan yang diterjemahkan sebagai kekuasaan, lahirlah perilaku agresif yang menghalalkan tindak kekerasan dalam menjangkau ambisi.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Yulius P. Hermawan, 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 26.

<sup>17</sup> Anak Agung & M. Yani. Op. Cit., hal. 121

<sup>18</sup> Connie R. Bakrie. 2010. *Membangun kekuatan sistem pertahanan dan postur TNI* dalam Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi. Jakarta: LP3ES. Hal. 133

<sup>19</sup> Hans J Morgenthau, 1990, *Politik Antar Bangsa*, terjemahan S.Maimoen, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal.71-135

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif, yakni menggambarkan, mencatat, menganalisis serta menginterpretasikan kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa yang terkait dengan permasalahan. Penelitian ini kemudian diharapkan bisa memberikan kejelasan mengenai kondisi yang berhubungan dengan aspek politik dan keamanan di Laut Cina Selatan.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka (*Library Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku, artikel, dokumen, internet, majalah maupun surat kabar.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data teoritis yang bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan dengan materi skripsi penulis, yakni data yang diperoleh dari beberapa macam sumber literatur. Adapun data yang diperlukan antara lain mengenai:

- a. Aspek Politik dan Keamanan Laut Cina Selatan
- b. Kondisi Politik dan Keamanan Laut Cina Selatan

#### **4. Teknik Analisis Data**

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa studi kasus artinya penulis berusaha menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari beberapa sumber yang menggambarkan situasi Politik dan Keamanan di kawasan Laut Cina Selatan melalui data yang ada serta mencari kaitan keduanya melalui analisis terhadap fakta dan data yang tersedia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Tentang Politik

Istilah politik sudah ada sejak zaman Yunani Kuno. Di mana politik didefinisikan sebagai usaha manusia untuk mendapat kekuasaan. Istilah ini kemudian mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman. Di dalam hubungan internasional, istilah ini sering digunakan tetapi disandingkan dengan kata lainnya misalnya politik internasional ataupun politik luar negeri suatu negara.

Menurut Mitchell dan Mitchell politik adalah suatu pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan negara secara keseluruhan.<sup>20</sup> Sedangkan Karl W. Deutsch mengemukakan definisi politik secara jelas pada bidang yang digeluti oleh politik itu sendiri. Menurutnya:

“Politik adalah keseluruhan proses pengambilan keputusan melalui sarana umum terutama yang menyangkut tentang kegiatan pemerintah. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan-tindakan umum atau *public action*, apa yang akan dilakukan dan siapa mendapat apa.”<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Joyce M. Mitchell and William C. Mitchell. 1969. *Political Analysis and Public Policy : An Introduction To Political Science* (Chicago: Rand Mc Nally) No.4-5

<sup>21</sup> Karl W. Deutsch. 1972. *Politics and government: How people Decide Their Fate*. Boston: Houghton Mifflin Company hal.3

Ahli politik lainnya yakni Ramlan subakti mendefinisikan politik sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah tertentu.<sup>22</sup> Menurut Prof Miriam Budiharjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, bahwa Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, politik tidak hanya dilaksanakan oleh pihak pemerintah saja atau dalam hal ini suprastruktur politik negara tetapi semua elemen yang terkait dengan negara tersebut termasuk juga interaksi yang dilakukan oleh individu-individu dalam suatu negara. Secara umum dalam politik terdapat lima unsur penting yang terkait satu sama lainnya yakni negara, kekuasaan pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum serta pembagian dan alokasi. Disamping itu politik sering diartikan sebagai usaha sekelompok orang untuk memperoleh kekuasaan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Meskipun politik memang tidak bisa lepas dari unsur kekuasaan tetapi juga memiliki seni apabila dilaksanakan oleh orang-orang yang paham dengan politik itu sendiri.

Sedangkan dalam hubungan internasional sendiri bahwa politik tidak bisa dilepaskan dari dua istilah yakni kerja sama dan persaingan.<sup>24</sup> Di satu sisi, setiap negara di dunia bekerja sama untuk mencapai kepentingan nasional masing-

---

<sup>22</sup> Miriam, Budiharjo, 2004, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama) hal 10

<sup>23</sup> *Ibid.* hal 9

<sup>24</sup> *Ibid* hal 15

masing, baik itu dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Tetapi disisi lain setiap negara berlomba untuk mendapatkan kepentingan nasional terutama bidang ekonomi dan pertahanan keamanan. Politik dapat juga berarti segala aktifitas yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk atau system.

## **B. Konsep Tentang Keamanan**

Keamanan jika diartikan secara umum adalah kondisi atau perasaan aman dari kekerasan atau bahaya. Konsep keamanan telah banyak diperdebatkan oleh para ahli hubungan internasional. Kaum realis menganggap bahwa keamanan didasari pada konsep power dan peace. Adapun kaum idealis menganggap keamanan sebagai konsekuensi dari damai, dimana kedamaian abadi akan menghasilkan keamanan bagi sesama.

Secara etimologi konsep keamanan (*Security*) berasal dari bahasa Latin *securus* (*se+cura*) yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (*free from danger, free from fear*). Kata ini juga bisa bermakna dari gabungan kata *se* (yang berarti tanpa/*without*) dan *curus* (yang berarti *uneasi-ness*), sehingga bila digabungkan dengan kata ini bermakna *liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risk or threats*.<sup>25</sup> Dalam hubungan internasional, setiap aktor akan mempertaruhkan segalanya demi pencapaian keamanan (nasional).

---

<sup>25</sup> Yulius P.Hermawan,2007.*Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional:Aktor , Isu dan Metodologi* Yogyakarta:Graha Ilmu.Hal.26

Menurut Walter Lippman, Keamanan adalah *a nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, if challenged, to maintain them by victory in such a war.*<sup>26</sup> Walter Lippman merangkum kecenderungan ini dengan menyatakan bahwa suatu negara berada dalam keadaan aman selama negara itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting dan dapat menghindari perang atau jika terpaksa harus melakukan peperangan dapat keluar sebagai pemenang.<sup>27</sup>

Dalam realisme, elemen-elemen utama dalam hubungan internasional terdiri dari beberapa gagasan utama, yakni aktor dominan tetap berada pada negara-bangsa (*nation-state*), kepentingan nasional merupakan aspek utama yang harus diraih setiap negara-bangsa untuk bisa tetap *survive* dengan hirauan utama pada isu *high politics*, seperti keamanan melalui instrument *military power*. Bahkan setiap negara akan selalu berupaya untuk memaksimalkan posisi kekuatan (*power*) relatifnya dibandingkan negara lainnya atau setidaknya tercipta *balance of power*.<sup>28</sup> Semakin besar jaminan militernya, maka semakin besar pula jaminan keamanan yang dimiliki negara tersebut.

Adapun, konsep mengenai keamanan internasional adalah usaha yang dijalankan oleh badan nasional dan internasional, seperti PBB, untuk memastikan keselamatan dan keamanan. Usaha ini termasuk aksi militer dan persetujuan diplomatik seperti "*treaty*" dan "*convention*". Keamanan nasional dan

<sup>26</sup> Anak Agung Banyu Perwita an Y.M.Yani.Log.cit.Hal.121

<sup>27</sup> Cornie R.Bakrie.2010. *Membangun Kekuatan Sistem Pertahanan dan Postur TNI dalam Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi*.Jakarta:LP3ES.Hal. 133

<sup>28</sup> Ibid, hal 27

internasional saling berhubungan, karena bila keamanan nasional akan mudah menyebar menjadi masalah keamanan internasional.<sup>29</sup> Sedang, keamanan nasional menunjuk ke kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi dan militer dan perjalanan diplomasi, baik dalam damai dan perang.

### C. Konsep Konflik

Mempelajari hubungan internasional atau hubungan antar bangsa berarti mempelajari dua kajian utama yang selalu mengemuka yaitu konflik dan kerjasama. Konflik terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan antara dua atau lebih pihak yang saling berinteraksi. Tetapi kerjasama yang terjalinpun bisa berubah menjadi sebuah konflik ketika dalam interaksinya salah satu pihak yang terlibat menyalahi kesepakatan. Dan sebaliknya sebuah konflik yang terjadi ketika telah menemukan jalan damai, dapat diteruskan oleh pihak-pihak yang berkonflik menjadi sebuah bentuk kerjasama.

Dalam dunia Internasional konflik juga sering kali terjadi yang tidak hanya melibatkan satu atau dua negara, tetapi melibatkan banyak negara dan tentunya komunitas internasional. Dalam sejarah, masa lalu hubungan Internasional, konflik menjadi satu hal sulit dipisahkan dengan kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena konflik sudah dikenal sejak dulu apalagi ketika dunia dikuasai oleh dua kekuatan besar yang kemudian mengalami konflik berkepanjangan dan

---

<sup>29</sup> Wikipedia, "Keamanan Internasional", 8 Oktober 2005, [http://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan\\_Internasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan_Internasional). Diakses tanggal 20 November 2011

melahirkan berbagai peperangan yang menimbulkan kematian yang luar biasa jumlahnya.

Pernyataan diatas jelas mendeskripsikan konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan. Yang menjadi akar permasalahan dari konflik tersebut adalah berasal dari keinginan untuk menguasai suatu wilayah yakni Laut Cina Selatan yang diperebutkan lebih dari satu negara, hingga akhirnya terjadilah konflik klaim tumpang tindih di wilayah perairan yang diketahui memiliki potensi sumber daya alam dan potensi geografis tersebut.

Konflik secara umum adalah suatu kondisi yang mengacu pada adanya persaingan antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh sejumlah perbedaan kepentingan yang diperjuangkan oleh masing-masing pihak. Hingga saat ini fenomena konflik terus saja terjadi dan mengalami perkembangan tidak hanya antar individu tetapi juga telah mencakup level antar-negara (domestik, regional, maupun global) bidang cakupannya pun juga semakin meluas dimana bukan hanya dari sisi ideologi saja tetapi juga dari sisi etnis, agama, wilayah, politik, ekonomi, teknologi, hingga persaingan militer. Konflik yang terjadi di dunia ini bukanlah hal yang baru dalam kehidupan para aktor internasional. Karena sejak dahulu apa yang dikenal dengan konflik telah ada dan muncul dalam kehidupan di dunia internasional. Artinya bahwa pola hubungan yang ada di dunia ini tidak selalu memperlihatkan adanya suatu keharmonisan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Drs. Zainuddin Djafar, M.A., *Study Hubungan Internasional dan Masalah-masalah Teoritisnya*, Jakarta: 1990, hal 105

Konflik merupakan gejala sosial yang sudah setua peradaban manusia. manusia sejak awal penciptaanya sudah mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut ada yang bisa saling melengkapi kekurangan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan ada juga yang saling bertentangan hingga bisa menimbulkan konflik. Hal itu terjadi pula pada masyarakat, malah semakin berkembang masyarakat semakin banyak juga konflik yang ada di dalamnya. Ada juga yang berpendapat bahwa konflik adalah sesuatu yang mutlak terjadi dalam suatu masyarakat sehingga masyarakat tersebut bisa berkembang.

Interaksi yang terjadi baik itu antar-individu, antarnegara, maupun antar kelompok masyarakat mengandung kemungkinan terjadinya konflik terlebih ketika tidak semua kepentingan bisa terakomodasi dengan baik. Bahkan konflik dengan kekerasan bisa mengakibatkan perang yang tidak saja harus mengorbankan harta dan jiwa, tetapi juga mengancam ekosistem dan kelanjutan hidup umat manusia di permukaan bumi ini, terutama setelah ditemukannya senjata pemusnah massal baik itu nuklir maupun biologi. Plano dan kawan-kawan mendefinisikan konflik sebagai suatu jenis interaksi yang ditandai dengan bentrokan atau tubrukan diantara kepentingan gagasan, kebijakan, program, dan pribadi atau persoalan dasar yang lainnya yang satu sama lain saling bertentangan.<sup>31</sup>

Dalam interaksi antara negara tidak jarang menimbulkan konflik. Beberapa pakar bahkan mengklasifikasi konflik sebagai bagian dari interaksi antar negara

---

<sup>31</sup> Jack C. Plano (et.al), 1985, Kamus Analisa Politik, Terjemahan Drs. S Siregar, Jakarta: CV. Rajawali, hal.40

dan oleh karena itu konflik merupakan hal yang wajar terjadi dalam hubungan internasional. Pendapat ini didukung oleh Dahlan Nasution bahwa konflik merupakan persaingan, apakah lugas, semu, atau masih berupa sesuatu yang bersifat potensi, adalah suatu hal yang normal dalam hubungan antar negara yang bermula dari perkembangan sistem negara kebangsaan.<sup>32</sup> Meskipun demikian, setiap konflik membutuhkan penyelesaian karena apabila dibiarkan akan menjadi ancaman terhadap keamanan dan politik internasional.

Dalam sistem internasional konflik dan kerjasama menjadi dua kutub yang saling berlawanan, oleh Frankel diandaikan seperti hubungan individual dalam kehidupan sehari-hari. Pada ekstrim pertama menurut Frankel,

Hubungan didasarkan atas cinta sebagaimana layaknya seorang ibu terhadap anaknya, sementara pada kutub lainnya didasarkan pada rasa benci dan ketakutan. *Perbedaannya*, hubungan antara negara tidak pernah didasarkan pada rasa cinta murni, dan dalam hak-hak tertentu rasa benci dapat saja mencuat.<sup>33</sup>

Konflik sebagai suatu fenomena tidak akan pernah absen dari percaturan politik internasional selama interaksi antar negara di dunia masih berlangsung disertai dengan perbedaan-perbedaan yang ada yang kemudian bisa memicu timbulnya konflik.

Menurut penganut paradigme realis, politik antar bangsa itu hakikatnya adalah pertarungan perebutan kekuasaan (*struggle for power*). Dengan konsep kepentingan yang diterjemahkan sebagai

---

<sup>32</sup> Drs Dahlan Nasution, *Politik Internasional: Konsep dan Teori*, Jakarta: Erlangga, 1991, hal.53

<sup>33</sup> Joseph Frankel, *Hubungan Internasional*. Jakarta: ANS Sungguh Bersaudara, 1990. Hal 98-99

kekuasaan, lahirilah perilaku agresif yang menghalalkan tindak kekerasan dalam menjangkau ambisi.<sup>34</sup>

Menurut Miall, yang dimaksud dengan konflik adalah:

Pengejaran tujuan saling bertentangan dari kelompok-kelompok yang berbeda, menunjukkan rentangan waktu yang lebih luas dan kelas perjuangan yang lebih lebar dibandingkan dengan konflik bersenjata, entah itu diikuti oleh sarana perdamaian ataupun dengan menggunakan kekuatan (sejumlah ahli teori membedakan antara pertikaian dengan kepentingan yang dapat dinegosiasikan dan yang dapat diatasi oleh kompromi, dan konflik yang lebih dalam yang melibatkan kebutuhan manusia dan hanya dapat diselesaikan dengan menghilangkan penyebab tersembunyinya).<sup>35</sup>

Konflik telah menjadi bahan kajian yang tidak habis-habisnya dibahas oleh banyak pemikir politik internasional dan hubungan internasional. Kedua studi tersebut kemudian memunculkan dua istilah konflik yaitu konflik dengan kekerasan/*violent conflict* dan konflik tanpa kekerasan/*non-violent conflict*. Meskipun kedua istilah tersebut kemudian dikaburkan oleh kenyataan bahwa konflik itu identik dengan kekerasan, istilah itu masih tetap dipergunakan oleh banyak pemikir dan penstudi politik maupun hubungan internasional. Jika kita mengacu pada perbedaan antara istilah konflik dan pertikaian maka tidak mengherankan jika konflik selalu diidentikkan dengan kekerasan karena tidak mungkin negosiasi membuat pihak-pihak yang berkonflik kemudian tidak bisa menahan diri dan akhirnya menggunakan kekerasan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.

<sup>34</sup> Hans J Morgenthau, Loc.cit.hal.71-135

<sup>35</sup> Hugh Miall, 1999, *Resolusi damai konflik kontemporer: menyelesaikan, mencegah, mengelola, dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama, dan ras*, terjemahan Tri Budhi Satrio, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.28-29

Ahli-ahli teori politik telah membuat banyak pengelompokan konflik, ada yang membaginya dilihat dari pihak-pihak yang bertikai, dari sumber konflik, dan penyebab terjadinya konflik. Ditinjau dari pelaku konflik, Miall mengklasifikasikannya menjadi dua yaitu konflik antar-negara dan konflik bukan antar-negara. Dalam konflik bukan antar negar ia membaginya menjadi tiga tipe yaitu konflik revolusi/ideologi, konflik faksional, dan konflik identitas/pemisahan. Istilah konflik ideologi mempunyai tujuan merubah sifat alami pemerintah suatu negara misalnya merubahnya dari sistem kapitalis kesosialis, konflik faksional semata-mata hanya perjuangan untuk mengendalikan negara atau bagian dari negara, sedangkan konflik identitas/pemisahan adalah ancaman bagi suatu negara.<sup>36</sup>

Berdasarkan studi kasus mengenai konflik, Holsti membagi konflik menjadi enam menurut karakteristik penyebab timbulnya konflik :

#### 1. Konflik Wilayah Terbatas

Konflik timbul akibat adanya pandangan yang tidak cocok dengan acuan pada pemilihan suatu bagian khusus wilayah atau pada hak-hak yang dinikmati oleh suatu negara di atau dekat wilayah negara lain. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh perbatasan yang lebih aman. Disamping itu isu kedaulatan mengenai minoritas etnis menjadi sasaran juga dalam konflik ini sebagai usaha untuk mengklaim suatu negara guna mengendalikan wilayah yang dikuasai oleh pihak lain.

---

<sup>36</sup> Ibid. Hal.44

2. Konflik yang berkaitan terutama dengan komposisi pemerintah

Tipe konflik ini sering mengandung nada tambahan ideologis yang kuat. Maksudnya adalah menjatuhkan sebuah rezim dan sebagai gantinya mendirikan suatu pemerintahan yang cenderung lebih menguntungkan pihak yang melakukan intervensi.

3. Konflik Kehormatan Nasional

Pemerintah mengancam atau bertindak untuk membersihkan pelanggaran tertentu yang telah diduga. Hal ini bisa dilihat jika suatu negara meningkatkan insiden tertentu yang relatif kecil menjadi suatu krisis penuh.

4. Imperialisme Regional

Pemerintah berusaha menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya demi suatu kombinasi tujuan ideologis, keamanan, dan perdagangan.

5. Konflik Pembebasan

Tipe konflik ini biasa juga disebut perang revolusioner yang dilakukan oleh suatu negara untuk "membebaskan" rakyat negara lain.

6. Konflik Unifikasi Nasional

Konflik yang timbul dari tujuan suatu pemerintah untuk mempersatukan negara yang terpecah.<sup>37</sup>

Dengan demikian terminologi konflik dalam studi hubungan internasional tetap melingkupi istilah perang (*war*) – dalam konteks ini contoh yang paling dekat adalah *Could War*. Esensinya sama, baik istilah perang maupun istilah

<sup>37</sup> K.J. Holsty, 1988, *Politik Internasional Kerangka untuk Analisa*, edisi keempat jilid 2, terjemahan: M.Tahir Azhary, Jakarta: Penerbit Erlangga

konflik berintikan pertentangan kepentingan dengan motif yang beragam, bisa politik, ekonmi, kultural sosial, atau bisa juga persoalan strategi militer. Itulah sebabnya pembahasan tentang konflik oleh para pengkaji bidang hubungan internasional senantiasa menyertakan pembahasan mengenai perang.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Dahlan Nasution. Loc. cit hal 53-54

### BAB III

## GAMBARAN UMUM TENTANG LAUT CINA SELATAN DAN MASALAH POLITIK DAN KEAMANAN KONFLIK DI LAUT CINA SELATAN

### A. Laut Cina Selatan

#### 1. Profil Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan adalah Laut tepi, yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik, mencakup daerah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3.5 km<sup>2</sup>. Merupakan badan laut terbesar setelah kelima samudera. Kepulauan Laut Cina Selatan membentuk sebuah kepulauan yang berjumlah ratusan. Laut ini biasa disebut sebagai Laut Selatan saja di daratan Cina. Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan dengan potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional. Menjadikan Laut Cina Selatan menjadi salah satu kawasan yang sangat penting.

Secara geografis Laut Cina Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, yang batas selatannya 3° Lintang Selatan antara Sumatra Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata), dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Cina Daratan. Laut Cina Selatan

terletak di Sebelah Selatan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan; di sebelah barat Filipina; di sebelah barat laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia; di sebelah timur laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan di sebelah timur Vietnam.

Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan adalah (searah jarum jam dari utara) Republik Rakyat Cina (RRC) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik Cina (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut Cina Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong), Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig.<sup>39</sup> Di laut ini, ada lebih dari 200 pulau dan karang yang diidentifikasi, kebanyakan darinya di daerah kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly tersebar seluas 810 sampai 900 km yang meliputi beberapa 175 fitur insuler yang diidentifikasi, yang terbesarnya menjadi kepulauan Taiping (Itu Aba) yang panjangnya 1,3 km dan dengan ketinggian 3,8 m. Pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan, yang membentuk kepulauan, jumlahnya mencapai ratusan.

Laut dan pulau-pulau yang sebagian besar tidak berpenghuni tersebut di klaim oleh beberapa negara, klaim tersebut jelas tercermin pada beragam nama yang digunakan untuk menyebut pulau-pulau dan laut tersebut. Beragam nama digunakan untuk menyebut Laut Cina Selatan, hal ini

---

<sup>39</sup> "Laut Cina Selatan" [www.anneahira.com/laut-cina-selatan.htm](http://www.anneahira.com/laut-cina-selatan.htm). Log.Cit , Diakses tanggal 25 juni 2010

mencerminkan klaim historis untuk menghegemoni laut tersebut. *South China Sea* merupakan nama dalam bahasa ingris yang paling sering digunakan untuk menyebut Laut Cina Selatan. Sementara pelaut Portugis pada abad ke enam belas menyebutnya *Mar da China* (Laut Cina). Kemudian untuk membedakannya dengan wilayah perairan didekatnya, namanya berubah menjadi Laut Cina Selatan.

Dalam hal penamaan, Republik Rakyat Cina (RRC), menyebutnya dengan nama *Laut Selatan* saja. Secara resmi, pemerintah Vietnam menyebutnya *Bien Dong* (Laut Timur). Nama *Bien Dong* digunakan pada peta resmi Vietnam. Bagian Laut Cina Selatan di bagian wilayah Filipina sering disebut *Dagat Luzon* (Laut Luzon) atau Laut Filipina Barat, karena keberatan dengan nama Laut Cina Selatan, sebab seolah-olah kawasan itu milik Republik Rakyat Cina (RRC).<sup>40</sup>

Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi geografis yang sangat besar. Laut Cina Selatan memiliki potensi sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam yang terkandung di dalamnya dengan jumlah yang tidak sedikit, serta dikatakan memiliki potensi geografis karena kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional (jalur lintas laut perdagangan internasional). Selain itu kawasan ini juga banyak dilalui oleh Armada Angkatan Laut, baik berupa kapal tengker, maupun Armada-armada Angkatan Laut dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia,

---

<sup>40</sup> Ibid.

Jepang, Korea yang melintasi laut tersebut. Disamping itu wilayah ini juga merupakan salah satu lintas pelayaran yang paling strategis di dunia dan juga meliputi salah satu jalur maritim utama di dunia, disamping juga merupakan kawasan yang menyimpan berbagai hubungan biodiversity kelautan terkaya di dunia.<sup>41</sup>

Di dalam Kawasan Laut Cina Selatan terdapat Kepulauan Sparty dan Paracel yang tergolong titik rawan dalam soal klaim teritorial. Kepulauan Sparty dan Paracel adalah yang menjadi fokus perebutan antara negara-negara pengklaim (*claimants*). Tetapi yang lebih di sorot adalah kepulauan Sparty yang kemudian menjadi isu dominan Internasional.<sup>42</sup>

Laut Cina Selatan diklaim sejumlah negara, dan didalamnya terdapat kepulauan Spratly yang telah lama menjadi wilayah sengketa yang diperebutkan berbagai negara. Republik Rakyat Cina (RRC) berebut kepulauan Spratly dengan Brunei, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan. Sementara, kepulauan Paracel di klaim oleh Republik Rakyat Cina (RRC), Taiwan, dan Vietnam. Selain saling klaim diantara negara-negara yang berlokasi di perairan Laut Cina Selatan tersebut, juga terdapat kepentingan –kepentingan negara-negara besar seperti: Amerika Serikat, Rusia, Negara-negara Eropa barat, Jepang, Korea, Taiwan kepentingan dalam hal keperluan pelayaran dan keperluan kandungan-kandungan sumber

<sup>41</sup> "Potensi Konflik di Laut Cina Selatan" <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/115-november-2010/980-potensi-konflik-di-kawasan-laut-china-selatan>. Bandung diakses tanggal 1-november-2010-menteri-lua.html Diakses tgl 25 Juni 2010

<sup>42</sup> "Mencermati Sengketa Teritorial Laut Cina Selatan" <http://judiono.com/2009/01/05/mencermati-sengketa-teritorial-laut-china-selatan/htm>, Diakses tanggal 05 Januari 2011

daya alam berupa minyak bumi dan gas bumi yang terkandung di dalam wilayah laut Cina Selatan.<sup>43</sup>

## 2. Ruang Lingkup Laut Cina Selatan

Secara geografis Laut Cina Selatan dikelilingi oleh sepuluh negara pantai, (Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina). Serta negara tak berpantai yaitu Laos, dan *dependent territory* yaitu makau. Luas perairan Laut Cina Selatan mencakup *Teluk Siam*, yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia, serta *Teluk Tonkin* yang dibatasi Vietnam, dan Republik Rakyat Cina (RRC). Kawasan Laut Cina Selatan bila dilihat dalam tata laut internasional merupakan kawasan yang bernilai ekonomis, politis, dan strategis. Kawasan ini menjadi sangat penting karena kondisi potensi geografis maupun kondisi potensi sumber daya alam yang dimilikinya.

Selain itu, kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional (Jalur lintas perdagangan Internasional). Sehingga menjadikan kawasan itu mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama. Di Laut Cina Selatan sendiri terdapat empat kelompok gugusan kepulauan dan karang-karang yaitu: Paracel, Spratly, Pratas, dan kepulauan Maccalesfield. Meskipun sengketa teritorial di Laut Cina Selatan tidak terbatas pada kedua gugusan kepulauan Spratly dan Paracel, (misalnya perselisihan mengenai pulau Phu Quac di teluk Thailand antara kamboja dan Vietnam), namun

<sup>43</sup> KOMPAS edisi, Selasa 21 Juni 2011 *Singapura Desak Cina Jelaskan Klaim*, Diakses tanggal 21 November 2011

klaim multilateral Spratly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya. Diantara kedua kepulauan itu permasalahannya lebih terpusat pada kepulauan Spratly, yang merupakan gugus kepulauan yang mencakup bagian Laut Cina Selatan. Yang diklaim oleh enam negara yaitu Republik Rakyat Cina (RRC), Taiwan, Vietnam, Brunei, Filipina, dan Malaysia. Sementara kepulauan Paracel dan juga paratas, praktis secara efektif masing-masing sudah berada di bawah kendali Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan.

Mengenai penamaan kepulauan di Laut Cina Selatan, umumnya tergantung atas klaimnya. Taiwan misalnya menamakan kepulauan spratly dengan Shinnenggungto. Vietnam menyebutnya dengan Troung Sa (Beting Panjang) Filipina menyebut Kalayaan (Kemerdekaan). Malaysia menyebut dengan nama Itu Aba dan terumbu layang-layang sedangkan Cina lebih suka dengan menyebut Nansha Quadao (Kelompok Pulau Selatan). Masyarakat internasional menyebutnya dengan nama Kepulauan Spratly yang berarti burung layang-layang.<sup>44</sup>

Di dalam Laut Cina Selatan terfokus atas dua kepulauan yang menjadi sumber sengketa antara beberapa negara yang menginginkan kawasan Laut Cina Selatan, yakni kepulauan Spratly dan Paracel. Kedaulatan atas kawasan laut serta wilayah di kepulauan Spratly dan Paracel adalah dua rangkaian kepulauan yang diklaim oleh sejumlah negara. Selain rangkaian pulau ini, ada pula pulau tak berpenghuni, atol, dan karang di seputar

---

<sup>44</sup> "Konflik Laut Cina Selatan" <http://irjournal.webs.com/apps/blog/show/4113964.html> ,  
Diakses tanggal 09 november 2010

perairan ini. Beberapa pulau yang berada di kawasan Laut Cina Selatan adalah yang menjadi fokus daya tarik negara-negara yang menginginkan kepemilikan kawasan ini karena potensi sumber daya alam dan potensi geografis yang dimilikinya.

Kepulauan Spratly dan Paracel kemungkinan memiliki cadangan besar sumber alam di seputar kepulauan itu. Namun tidak banyak rincian tentang kekayaan mineral ini dan perkiraan didasarkan pada sumber daya mineral di dekat wilayah itu. Para pejabat Republik Rakyat Cina (RRC) memiliki perkiraan yang paling optimistik atas sumber mineral di sana. Menurut data yang dikutip oleh Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), Cina memperkirakan cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel -atau 10 kali lipat dari cadangan milik Amerika Serikat. Namun para ilmuwan AS memperkirakan jumlah minyak di sana 28 miliar barel. Sedangkan Menurut EIA, cadangan terbesar kemungkinan adalah gas alam. Perkiraananya sekitar 900 triliun kaki kubik, sama dengan cadangan yang dimiliki Qatar. Selain itu kawasan ini juga diketahui juga merupakan rute utama perkapalan dan sumber pencarian ikan bagi kehidupan ribuan orang yang tinggal di sekitar.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> "Sengketa Kepemilikan Kawasan Laut Cina Selatan"  
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan\\_khusus/2011/07/110719\\_spratlyconflict.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict.shtml).  
Diakses tanggal 16 Jan 2012

## **B. Masalah Politik dan Keamanan Konflik di Laut Cina Selatan**

### **1. Sumber Masalah Politik dan Keamanan konflik di Laut Cina Selatan**

Sengketa teritorial dan penguasaan kepulauan diawali oleh tuntutan Republik Rakyat Cina (RRC) atas seluruh pulau-pulau yang berada di kawasan Laut Cina Selatan yang megacu pada catatan sejarah, penemuan situs, dokumen-dokumen kuno, peta-peta dan penggunaan gugus-gugus pulau oleh nelayannya. Menurut Republik Rakyat Cina (RRC) sejak 2000 tahun yang lalu, Laut Cina Selatan telah menjadi jalur pelayaran bagi mereka. Namun Vietnam membantahnya dan menganggap kepulauan Spartly dan Paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya. Vietnam menyebutkan kepulauan Spartly dan Paracel secara efektif diudukinya sejak abad ke-17 ketika kedua kepulauan itu tidak berada dalam penguasaan suatu negara.

Dalam perkembangannya, Vietnam tidak mengakui wilayah kedaulatan Republik Rakyat Cina (RRC) di kawasan tersebut, sehingga pada saat perang dunia II berakhir Vietnam Selatan menduduki kepulauan Paracel, termasuk beberapa gugus di kepulauan Spartly. Selain Vietnam Selatan kepulauan Spartly juga diduduki oleh Taiwan sejak perang dunia II dan Filiphina tahun 1971, alasan Filiphina menduduki kepulauan tersebut karena kawasan itu merupakan tanah yang sedang tidak dimiliki oleh negara manapun. Filiphina juga menunjuk perjanjian San-Fransisco 1951, yang antara lain menyatakan, Jepang telah melepas haknya terhadap kepulauan

Spartly. Malaysia juga menduduki beberapa gugus kepulauan Spartly yang di namai terumbu layang. Menurut Malaysia, langkah itu di ambil berdasarkan peta batas landasan kontinen Malaysia tahun 1979, yang mencakup sebagian dari kepulauan Spartly. Sementara Brunei yang memperoleh kemerdekaan secara penuh dari Inggris juga 1 Januari 1984 kemudian juga ikut mengklaim, namun Brunei hanya mengklaim perairan dan bukan gugus pulau. Sampai saat ini negara yang aktif menduduki di sekitar kawasan ini adalah Taiwan, Vietnam, Filipina dan Malaysia. Dengan kondisi seperti ini, masalah penyelesaian sengketa teritorial di Laut Cina Selatan tampaknya akan menjadi semakin rumit dan membutuhkan mekanisme pengolaan yang lebih berhati-hati.<sup>46</sup>

Selanjutnya, dasar klaim Malaysia dan Brunei adalah kawasan Laut China Selatan masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka, sebagaimana yang didefinisikan oleh Konvensi PBB mengenai Hukum Laut International (UNCLOS 1982) yang mengakui kedaulatan sebuah negara atas wilayah sejauh 12 mil laut (sekitar 22,2 km) dari garis pantai, termasuk garis pantai dari pulau-pulau yang menjadi bagian Negara itu.<sup>47</sup>

Pada Desember 1947 Pemerintah Republik Rakyat Cina mengklaim (RRC) hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan dengan menerbitkan peta yang tidak hanya memuat kepulauan-kepulauan utama di wilayah Laut Cina Selatan, tetapi juga memberi tanda sebelas garis putus-putus (yang juga di

<sup>46</sup> [Johnpau.com/2010/11/09/91htm](http://Johnpau.com/2010/11/09/91htm), diakses tanggal 09 november 2010

<sup>47</sup> "Laut Cina Selatan Bukan Pepesan Kosong"  
<http://www.detiknews.com/read/2011/07/04/111551/1673799/471.html> Diakses pada tanggal 05 October 2011 pukul 17.18

sebut garis-garis berbentuk huruf U) di seputar wilayah perairan Laut Cina Selatan. Pihak Republik Rakyat Cina (RRC) mengklaim saat peta tersebut diterbitkan pertama kali tidak ada satupun negara yang menyampaikan protes diplomatik, sehingga terus digunakan Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC), sejak setelah kemenangan Partai Komunis 1949. Meski demikian, Republik Rakyat Cina (RRC) tidak pernah secara terbuka menyatakan detail klaimnya tersebut. Pada tahun 1976 pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) secara paksa mengambil alih dan menguasai kepulauan Paracel dari Vietnam. Kepulauan itu berada di sebelah utara kepulauan Spratly. Keduanya sama-sama di yakini kaya akan sumber daya alam gas dan minyak bumi.<sup>48</sup>

Saat itu Republik Rakyat Cina (RRC) menunda penyerbuannya ke Kepulauan Spratly dan baru pada tahun 1988 baru mulai melaksanakan niatnya, namun kepulauan lain seperti Kepulauan Pratas dan Kepulauan Paracel tampaknya sudah bukan masalah lagi bagi Republik Rakyat Cina (RRC). Negara ini secara de facto telah berhasil menguasai kepulauan Paracel meskipun sampai saat ini Vietnam tetap menuntut agar Republik Rakyat Cina (RRC) mengembalikan wilayah kepulauan itu kepadanya. Sementara itu kepulauan Pratas, sekarang ini berada di bawah kontrol Taiwan setelah pada tahun 1947 diserahkan oleh Jepang. Tampaknya Republik Rakyat Cina (RRC) belum menggugat-gugat kepulauan ini, mungkin karena wilayah itu dianggap perlu ditangani khusus berkaitan

---

<sup>48</sup> KOMPAS edisi, Selasa 21 Juni 2011. Log. cit

dengan kebijakan penyatuan kembali wilayah Taiwan. Hal ini juga terjadi atas pulau Itu Aba di Kepulauan Spratly yang hingga saat ini dikuasai Taiwan.<sup>49</sup>

Dimulai pada tahun 1988 ketegangan terjadi di kepulauan Spratly, Vietnam dan Republik Rakyat China (RRC) berperang di lautan memperebutkan gugusan batu karang Johnson (Johnson South Reef). Saat itu angkatan laut Vietnam di halang-halangi oleh dua puluh kapal perang milik Republik Rakyat Cina (RRC) yang sedang berlayar di Laut Cina Selatan, sehingga terjadi bentrokan yang mengakibatkan kurang lebih sebanyak 70 prajurit Angkatan Laut Vietnam tewas. Sengketa perbatasan yang memicu perang besar juga terjadi di perbatasan darat kedua negara pada tahun 1979 dan 1984. Selain itu juga seperti yang terjadi antara Republik Rakyat Cina (RRC) dan Vietnam yakni pendudukan Republik Rakyat Cina (RRC) atas Karang Mischief 1995, dan baku tembak antara kapal perang Republik Rakyat Cina (RRC) dan Filipina didekat pulau Campones 1996, menunjukkan sengketa tersebut bisa tersulut menjadi konflik terbuka sewaktu-waktu.<sup>50</sup> Sejak terjadinya konflik pada tanggal 14 Maret 1988 antara Angkatan Laut Republik Rakyat Cina (RRC) dan Angkatan Laut Vietnam di Kepulauan Spratly yang selama ini diklaim oleh banyak negara, ketegangan di wilayah itu terus meningkat.

<sup>49</sup> Soedjati Djiwandono *Berbagai Dimensi Konflik* Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta 1988, hal 312

<sup>50</sup> Johnpau. Wordpcs.com/2010/11/09/91htm, diakses tanggal 09 november 2010

## 2. Subtansi Masalah Politik dan Keamanan konflik di Laut Cina Selatan

Kawasan Laut Cina Selatan bila dilihat dalam tata lautan internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis. Dengan besarnya potensi yang dimiliki oleh kawasan Laut Cina Selatan sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerjasama. Dengan kata lain, kawasan Laut Cina Selatan yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat didalamnya, serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur pelayaran, perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan Laut Cina Selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun.<sup>51</sup>

Konflik di Laut Cina Selatan juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan kebutuhan akan sumber daya yang langka seperti minyak bumi, gas alam, ikan, dan sampai tingkat tertentu, transportasi. Minyak menjadi incaran utama karena hingga saat ini perebutan untuk mendapatkan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui ini tidak dapat dilepaskan dari konflik militer bahkan invasi militer. Sejak awal dekade 90-an hingga saat ini Republik Rakyat Cina (RRC) telah menjadi salah satu dari sepuluh importir minyak terbesar di dunia. Hal ini tentunya menjadikan Republik Rakyat Cina (RRC) harus selalu berusaha mendapatkan suplai minyak dari luar dalam jumlah cukup agar perekonomiannya dapat tetap berjalan dan berkembang pesat.

<sup>51</sup> "Konflik Laut Cina selatan" <http://irjournal.webs.com/apps/blog/show/4113964.html> diakses pada tanggal 05 October 2011 pukul 16.30

Kandungan minyak dan gas alam yang dimiliki Laut Cina Selatan membuat keterlibatan Republik Rakyat Cina (RRC) dalam konflik di kawasan ini menjadi tak terelakkan. Menurut perkiraan Republik Rakyat Cina (RRC) kawasan Laut Cina Selatan memiliki kandungan minyak tidak kurang dari 105 hingga 213 milyar barel. Sementara perkiraan U.S. Geological Survey kandungan minyaknya tidak lebih dari 28 milyar barrel.

Di samping itu, kawasan Laut Cina Selatan juga dikenal kaya dengan ikan yang merupakan sumber gizi penduduk di sekitarnya. Ditinjau dari hasil lautnya yang melimpah kawasan Laut Cina Selatan diperkirakan mampu menyediakan kebutuhan protein bagi satu milyar penduduk Asia, atau paling tidak 500 juta penduduk kawasan pantai. Mengingat ikan merupakan sumber makanan dari alam yang selalu diproduksi (*renewebel*) maka konflik di kawasan ini pun tidak dapat dilepaskan dari perburuan hasil laut tersebut.<sup>52</sup> Selain itu juga Kawasan Laut China Selatan yang juga dikenal sebagai Laut Kuning, berposisi sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam. Anugerah alami itu sering menjadi sumber konflik kepentingan bagi negara yang berada di sekitar perairan itu, di antaranya mengganggu pengelolaan sumber daya perikanan. Konflik di Laut China Selatan yang tidak berakhir akan sangat mengganggu potensi sumber daya perikanan di daerah itu dan sekitarnya. Dalam kondisi dunia yang semakin rawan terhadap ketersediaan pangan, katanya, konflik berkepanjangan yang

---

<sup>52</sup> Dr Bambang Cipto, MA. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar. 2007. hal. 204-205

berujung pada klaim kepemilikan wilayah laut itu, bisa semakin memperberat beban dunia terkhusus Asia Tenggara.<sup>53</sup>

Kawasan Laut Cina Selatan juga merupakan jalur strategis karena lebih dari empat puluh ribu kapal melewati jalur tersebut setiap tahunnya. Disamping itu kawasan ini merupakan jalur utama kapal-kapal minyak dari Timur Tengah yang mensuplai kebutuhan minyak Jepang. Sebaliknya, Jepang juga membutuhkan keamanan kawasan tersebut karena mensuplai jalur utama bagi kapal-kapalnya yang menyangkut barang-barang produksi menuju Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Ekonomi Jepang yang tergantung pada penjualan barang elektronik, mesin dan otomotif jelas membutuhkan stabilitas kawasan Laut Cina Selatan. Demikian pula Amerika yang membutuhkan stabilitas jalur laut bagi kelancaran kapal-kapal perangnya di kawasan tersebut.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> "Konflik Laut Cina Selatan Ganggu Sumber Perikanan"  
<http://www.antaraneews.com/berita/284379/konflik-laut-china-selatan-ganggu-sumber-perikanan>. Diakses tanggal 16 Jan 2012

<sup>54</sup> Dr Bambang Cipto, MA. Op.cit. hal.204-205

## BAB IV

### ESENSI POLITIK DAN KEAMANAN KONFLIK

#### DI LAUT CINA SELATAN

##### A. Aspek Politik konflik di Laut Cina Selatan

Diketahui Laut Cina Selatan adalah perairan yang sangat strategis di dunia. Laut Cina Selatan merupakan perairan semi tertutup (*semi-enclosed area*) yang menghubungkan antara daratan dan kepulauan Asia, juga Samudra Hindia dan Pasifik, Laut Cina Selatan menjadi salah satu alur transportasi laut utama yang tidak hanya strategis bagi negara-negara Asia Timur, namun juga bagi negara-negara di luar kawasan yang memiliki ambisi global. Karena letaknya yang sangat strategis dan besarnya potensi sumber daya alam maupun potensi geografis yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan maka tidak heran jika kawasan ini banyak diminati oleh berbagai negara khususnya negara yang berada disekitar kawasan yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.

Laut Cina Selatan bila dilihat dalam tata lautan internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis. Sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerjasama. Dengan kata lain, kawasan Laut Cina Selatan yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat didalamnya, serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur pelayaran, perdagangan dan distribusi minyak dunia,

menjadikan Laut Cina Selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun.<sup>55</sup>

Konflik teritorial di Laut Cina Selatan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, terutama atas kepulauan Pratas, kepulauan Paracel dan gugus Macclesfield di dekatnya, dan kepulauan Spratly. Serbuan atas beberapa pulau di kepulauan Spratly itu sudah lama diperkirakan terutama sejak Republik Rakyat Cina (RRC) berhasil merebut kepulauan Paracel dari tangan Vietnam (Vietnam Selatan) pada bulan Januari 1974. Tetapi sejak saat itu Republik Rakyat Cina (RRC) tidak segera menyerbu kepulauan Spratly, meskipun negara itu telah menegaskan kembali klaimnya atas kepulauan itu segera setelah wilayah paracel berhasil di duduki.<sup>56</sup>

Setelah perang Dunia II berakhir, kedua kepulauan itu menjadi sumber persengketaan yang semakin kompleks karena melibatkan banyak negara, khususnya dalam memperebutkan kepulauan Spratly. Sebelumnya menjelang akhir tahun 1946, Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) mengirimkan satuan tugas Angkatan Lautnya ke kedua kepulauan itu untuk menunjukkan bahwa Republik Rakyat Cina-lah yang berdaulat atas kedua pulau itu, dan pada bulan Januari 1947 Kedutaan Republik Rakyat Cina (RRC) di Paris mengeluarkan suatu pernyataan bahwa kepulauan Paracel dan kepulauan Spratly adalah bagian dari wilayah Republik Rakyat Cina (RRC). Tetapi pernyataan itu diprotes oleh

<sup>55</sup> "Konflik Laut Cina selatan" <http://irjournal.webs.com/apps/blog/show/4113964.html> Diakses pada tanggal 05 October 2011 pukul 16.30

<sup>56</sup> Soedjati Djiwandono *Berbagai Dimensi Konflik* Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta 1988.hal.309

Perancis, yang kemudian mengirimkan Armada Angkatan Lautnya untuk merebut kedua kepulauan itu.

Persengketaan atas kedua kepulauan itu sempat dibicarakan dalam konferensi Perdamaian di San Fransisco tanggal 4-8 September 1951. Pada saat itu Uni Soviet mengusulkan agar kedua kepulauan itu diserahkan kepada Republik Rakyat Cina (RRC). Tetapi usul itu ditolak dengan perbandingan 46 suara menolak dan 3 suara mendukung. Akhirnya konperensi berhasil menandatangani suatu perjanjian perdamaian yang salah satu pasalnya, yaitu pasal 2f dari bagian II, menyebutkan bahwa Jepang menyatakan mencabut semua hak dan klaimnya atas kepulauan Spratly dan kepulauan Paracel. Dengan perjanjian ini kedua kepulauan tersebut tetap berada di bawah kekuasaan Perancis sampai negara ini mengembalikannya kepada Vietnam (Vietnam Selatan) di bawah provinsi Perjanjian Geneva tahun 1954. Sampai awal tahun ini Vietnam menguasai sekitar 21 pulau. Catatan sejarah Vietnam ini dianggap sesuai dengan kebiasaan dalam hukum Internasional yaitu Prinsip Efektivitas.

Tetapi perjanjian San Fransisco tersebut rupanya juga dimanfaatkan oleh negara-negara lain untuk menduduki pulau-pulau di kepulauan Spratly. Dengan alasan bahwa dalam perjanjian San Francisco itu tidak dikemukakan kepada siapa kedua kepulauan itu diserahkan.<sup>57</sup> Sejak 1970 klaim terhadap kawasan tersebut meningkat pesat sejalan dengan perkembangan di bidang pncmuan dan hukum internasional. Perkembangan pertama menyangkut ditemukannya ladang minyak yang diperkirakan cukup banyak di kawasan tersebut berdasarkan survey geologi

---

<sup>57</sup> Ibid.hal.314

yang dilakukan para peneliti dari perusahaan Amerika dan Inggris. Penemuan ini sudah tentu membuat harga kepulauan dan pulau kecil serta batu karang di kawasan tersebut meroket. Perkembangan kedua, berkaitan dengan ditetapkannya Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ) sepanjang 200 mil laut bagi setiap negara berdasarkan ketentuan dari UNCLOS (*United Nations Conference on the Law of the Sea*).

Terbukanya peluang untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi kawasan Laut Cina Selatan dengan sendirinya mendorong negara-negara yang pantainya berbatasan langsung dengan kawasan tersebut segera melakukan klaim terhadap sebagian pulau, kepulauan, atau karang yang masuk dalam kawasan negaranya sebagaimana ditentukan oleh hukum laut internasional di atas. Republik Rakyat Cina (RRC), Vietnam, Philipina, Malaysia berlomba-lomba mengklaim, mengirim pasukan untuk mengamankan kepulauan yang mereka klaim, bahkan memberi konsesi pada perusahaan-perusahaan minyak asing, khususnya Amerika dan Inggris, untuk melakukan eksplorasi minyak di kawasan yang mereka klaim masing-masing. Persaingan dalam proses pernyataan hak ini berkembang menjadi konflik militer khususnya Republik Rakyat Cina (RRC) dan Vietnam tahun 1974 dan 1988. Perkembangan ini menunjukkan dengan jelas besarnya kepentingan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Vietnam lebih banyak disebabkan oleh isu tambang minyak. Sementara konflik antara Republik Rakyat Cina (RRC) dan

Philiphina lebih disebabkan oleh persaingan dalam perebutan hasil ikan di kawasan tersebut.<sup>58</sup>

Saat itu Republik Rakyat Cina (RRC) menunda penyerbuannya ke kepulauan Spratly dan baru pada tahun 1988 baru mulai melaksanakan niatnya, namun kepulauan lain seperti kepulauan Pratas dan kepulauan Paracel tampaknya sudah bukan masalah lagi bagi RRC. Negara ini secara de fakto telah berhasil menguasai kepulauan Paracel meskipun sampai saat ini Vietnam tetap menuntut agar Republik Rakyat Cina (RRC) mengembalikan wilayah kepulauan itu kepadanya. Sementara itu kepulauan Pratas, sekarang ini berada di bawah kontrol Taiwan setelah pada tahun 1947 diserahkan oleh Jepang. Tampaknya Republik Rakyat Cina (RRC) belum menggugat-gugat kepulauan ini, mungkin karena wilayah itu dianggap perlu ditangani khusus berkaitan dengan kebijakan penyatuan kembali wilayah Taiwan. Hal ini juga terjadi atas pulau Itu Aba di kepulauan Spratly yang hingga saat ini dikuasai Taiwan.<sup>59</sup>

Sejak terjadinya konflik pada tanggal 14 Maret 1988 antara Angkatan Laut Republik Rakyat Cina (RRC) dan Angkatan Laut Vietnam di Kepulauan Spratly yang selama ini diklaim oleh banyak negara, ketegangan di wilayah itu terus meningkat. Akibat dari pertempuran laut itu beberapa pasukan Vietnam tewas dan 74 lainnya hilang, selain itu Vietnam juga kehilangan tiga kapal perangnya. Berita-berita yang datang baik dari Hanoi maupun Beijing mengungkapkan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa itu telah memperkuat satuan Angkatan Laut

<sup>58</sup>Dr Bambang Cipto, MA. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar. 2007. hal. 206-207

<sup>59</sup> Soedjati Djiwandono. Op.cit. hal 312

masing-masing di wilayah itu. Vietnam telah menyiagakan Angkatan Udaranya untuk menghadapi segala kemungkinan. Sedangkan Republik Rakyat Cina (RRC) telah mengirimkan sekitar 20 kapal perangnya dan menempatkannya di sekitar pulau-pulau yang baru saja berhasil direbut dari Vietnam.<sup>60</sup>

Kepulauan Spratly yang letaknya di sebelah selatan kepulauan Paracel dan yang terdiri dari sekitar 500 pulau dan karang juga di klaim Republik Rakyat Cina (RRC) dengan alasan historis, yang merupakan satu-satunya alasan bagi Republik Rakyat Cina (RRC), karena alasan lain seperti letak geografis sama sekali tidak bisa digunakan kecuali bila Republik Rakyat Cina (RRC) telah berhasil menduduki salah satu pulau di dalam wilayah kepulauan itu karena kepulauan Spratly lepas dari landasan kontinen dataran Republik Rakyat Cina (RRC). Menurut Republik Rakyat Cina (RRC) klaimnya itu berdasarkan pada catatan-catatan sejarah, dokumen-dokumen kuno, peta-peta dan penggunaan untuk tempat persinggahan para nelayan ikan yang datang dari Republik Rakyat Cina (RRC). Menurut catatan-catatan sejarah Republik Rakyat Cina (RRC), sejak 2000 tahun yang lalu Laut Cina Selatan sudah menjadi jalur pelayaran mereka. Pada Dinasti Han dikatakan bahwa gambar Kaisar Wang Mang (3 sebelum masehi dan 23 Sesudah Masehi) pada uang logam tertua Republik Rakyat Cina (RRC) telah diketemukan di kepulauan Paracel. Catatan sejarah dalam zaman Dinasti Han Timur (tahun 25-220) menyebutkan eksistensi pulau-pulau di Dinasti Laut Cina Selatan. Demikian pula catatan sejarah yang ditulis dalam zaman Dinasti Sung (abad ke-8) menyebutkan banyak tentang kepulauan Paracel. Kemudian dalam

---

<sup>60</sup> Ibid..hal.309

zaman Dinasti Mongol, ketika kaisar khublai Khan memerintah Jenderal Shih Pi mengadakan ekspedisi ke Selatan (Pulau Jawa) tahun 1293, pasukan jenderal ini singgah dan beristirahat di kepulauan-kepulauan di Laut Cina Selatan yang dilaluinya. Kegiatan-kegiatan orang-orang Cina tersebut terus berlangsung dalam zaman dinasti-dinasti berikutnya dan dalam pemerintahan republik. Bahkan menurut catatan sejarah Republik Rakyat Cina (RRC), Kepulauan Paracel (*Xi Sha* dalam bahasa Cina) dan Kepulauan Spratly (*Nan Sha*) telah dicantumkan pada peta yang dibuat pada tahun 1430.<sup>61</sup>

Sementara Vietnam, selain mendasarkan tuntutannya pada aspek Hukum Internasional juga mengkombinasikan dengan aspek Historis. Berdasarkan catatan sejarah mengungkapkan kepulauan yang juga disebut Hoang Sa dalam bahasa Vietnam (*Xisha* dalam bahasa Cina) masuk dibawah distrik Binh Son Vietnam.<sup>62</sup> Vietnam juga mendasarkan klaimnya atas kepulauan Spratly dan Paracel pada alasan historis, tetapi di samping itu pihak Vietnam juga mendasarkan klaimnya atas kedua kepulauan itu pada kebiasaan-kebiasaan dalam Hukum Internasional. Menurut Vietnam, kedua kepulauan itu secara efektif telah diduduki sejak abad ke-17, ketika keduanya tidak berada pada kedaulan suatu negara. Kependudukan itu terus berlangsung sampai pasukan Republik Rakyat Cina (RRC) menyerbu dan merebutnya. Hal ini telah ditegaskan kembali di dalam buku putih yang dikeluarkan oleh Kementrian Luar Negeri Vietnam bulan April 1988. Pendudukan Vietnam pada abad ke-17 itu berdasarkan catatan dan peta yang dibuat oleh Do Ba

<sup>61</sup> Ibid.hal.312

<sup>62</sup> "Laut Cina Selatan Bukan Pepesan Kosong"  
<http://www.detiknews.com/read/2011/07/04/111551/1673799/471.html> Diakses pada tanggal 05 October 2011 pukul 17.18

Cong Dao pada abad itu. Dalam peta yang berjudul 'Toan 'Tap Thien Nam 'Tu Chi Lo Doc Thu (Peta Route dari Ibukota Keempat Penjuru), kedua kepulauan itu disebut dalam satu nama yaitu *Bai Cat Vang* dan ditempatkan di bawah pemerintahan distrik Bhin Son.

Di dalam *Bai Cat Vang* itu kepulauan Paracel disebut *Hoang Sa* dan kepulauan Spratly disebut *Truong Sa*. Kemudian secara terus-menerus kedua kepulauan itu dipertahankan oleh suatu satuan militer yang ditempatkan disana pada zaman pemerintahan Dinasti Tay Son (1786-1802) dan Dinasti Nguyen (1802-1945). Bahkan pendiri Dinasti Nguyen, Kaisar Gia Long, telah menunjuk Pham Quang Canh untuk memimpin suatu brigade untuk mengadakan eksplorasi di kepulauan Paracel pada tahun 1815.

Meskipun pihak Republik Rakyat Cina (RRC) menyatakan bahwa ketika Vietnam menjadi protektorat Perancis telah diadakan suatu perjanjian antara Republik Rakyat Cina (RRC) dan Perancis tahun 1887, yang memberikan kedua kepulauan itu kepada Republik Rakyat Cina (RRC), pihak Vietnam tetap menegaskan bahwa perjanjian itu telah menetapkan garis batas untuk daratan dan bukan untuk kepemilikan wilayah pulau-pulau di tengah samudera yang terletak beberapa ratus mil dari garis itu. Kemudian Vietnam juga menunjuk pada pendudukan kembali Kepulauan Paracel oleh Perancis pada tahun 1938, setahun setelah penyerangan Jepang ke Republik Rakyat Cina (RRC), sampai Jepang menduduki kembali kedua kepulauan itu pada tahun 1939-1946.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Soedjati Djiwandono. Op.cit. hal. 313-314

Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) secara paksa mengambil alih dan menguasai kepulauan Paracel yang terletak di laut tepi, bagian dari samudera pasifik ini dari Vietnam. Kepulauan itu berada di sbelah utara kepulauan Spratly. Keduanya sama-sama di yakini kaya akan sumber daya alam gas dan minyak bumi.<sup>64</sup> Bentrok antara Republik Rakyat Cina (RRC) dan Vietnam kembali pecah pada tahun 1988. Sedangkan Filipina juga merasa berhak atas Spratly karena letaknya yang juga secara geografis sangat dekat.

Selanjutnya, dasar klaim Malaysia dan Brunei adalah kawasan Laut China Selatan masuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka, sebagaimana yang didefinisikan oleh Konvensi PBB mengenai Hukum Laut International (UNCLOS 1982) yang mengakui kedaulatan sebuah negara atas wilayah sejauh 12 mil laut (sekitar 22,2 km) dari garis pantai, termasuk garis pantai dari pulau-pulau yang menjadi bagian Negara itu.<sup>65</sup>

Dalam bidang politik, pengaruh Republik Rakyat Cina (RRC) di kawasan sangat besar khususnya dalam konflik di Laut Cina Selatan. Republik Rakyat Cina (RRC) sangat agresif dalam mempertahankan kawasan Laut Cina Selatan yang diketahui memiliki potensi sumber daya alam dan potensi geostrategis dan juga diklaim oleh beberapa negara. Kawasan Asia Timur, khususnya dan dunia pada umumnya kini menghadapi suatu tantangan baru, yaitu meningkatnya Republik Rakyat Cina (RRC) sebagai kekuatan besar. Republik Rakyat Cina (RRC) memang berhak menjadi pemain utama dikawasan. Namun, masalahnya ialah

---

<sup>64</sup> KOMPAS edisi, Selasa 21 Juni 2011. Log.cit  
<sup>65</sup> "Laut Cina Selatan Bukan Pepesan Kosong" Loc.cit.

kekuatannya yang muncul mendadak, ekspansi ekonominya yang semakin luas dan tekanan-tekanan yang dilakukannya dalam menjalankan diplomasinya menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan tetangga Republik Rakyat Cina (RRC).<sup>66</sup>

Sampai saat ini konflik klaim tumpang tindih yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan masih terus berlangsung dan menjadi perdebatan antara beberapa negara di kawasan ASEAN melalui perundingan diplomasi. Diketahui pada tanggal 15 juni 2011, kapal patroli maritim milik Republik Rakyat Cina (RRC), Haixun 31, berlabuh di Singapura setelah berangkat dari Republik Rakyat Cina (RRC). Dalam perjalanannya diketahui kapal itu telah melewati perairan di sekitar kepulauan Paracel dan Spartly, yang menjadi sumber sengketa Laut Cina Selatan.

Namun sebelumnya pekan lalu Vietnam juga telah menggelar latihan perang amunisi tajam selama beberapa jam di perairan Laut Cina Selatan, yang juga di klaim oleh Republik Rakyat Cina (RRC). Latihan ini sudah direncanakan menyusul konflik terbaru dengan Republik Rakyat Cina (RRC) terkait sengketa di Spartly dan Paracel, pihak Vietnam menegaskan bahwa latihan ini hanya latihan rutin tahunan. Latihan ini berlangsung selama sembilan jam di sekitar Hon Ong, pulau tak berpenghuni, terletak sekitar 250 km dari paracel dan hampir 1.000 kilometer dari Spartly. Sengketa dan perseteruan antara negara pengklaim semakin ramai dengan aksi saling unjuk kebolehan dan kemampuan. Bulan depan Vietnam dijadwalkan kembali akan berlatih perang, kali ini bersama Angkatan

<sup>66</sup> Bantarto Bandoro *Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia* Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yogyakarta 2005 hal.15

Laut Amerika Serikat. Seolah tidak mau kalah, militer Republik Rakyat Cina (RRC) juga telah mengumumkan rencana rangkaian latihan perang lepas pantainya.<sup>67</sup>

Republik Rakyat Cina (RRC) menantang Vietnam untuk perang, hal ini di latar belakang atas kemarahan Republik Rakyat Cina (RRC) dengan sikap Vietnam yang menyambut baik keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Cina Selatan. Republik Rakyat Cina (RRC) dipastikan akan menguji coba kapal induk buaatannya, yang akan berlayar mulai 1 juli, bersamaan dengan peringatan 90 tahun Partai Komunis. Militer Republik Rakyat Cina (RRC) mengakui uji coba itu sekaligus menjadi efek penggetar dengan menunjukkan kemampuan dan kekuatan Angkatan Laut Cina. Amerika Serikat juga getol ingin terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan dengan alasan ingin menjamin kebebasan navigasi di perairan itu.

Menurut McCain, yang mantan perwira menengah Angkatan Laut Amerika Serikat, Washington harus memperluas dukungan politik dan militernya ke negara-negara Asia Tenggara serta memperkuat barisan menghadapi Republik Rakyat Cina (RRC). Menurutnya Republik Rakyat Cina (RRC) selalu mencari dan mencoba mengeksploitasi perpecahan yang memang sudah ada di dalam ASEAN. Mereka mempermainkan kondisi itu untuk kemudian menekan negara-negara terkait demi agenda kepentingan dan keuntungan Republik Rakyat Cina (RRC) sendiri.

---

<sup>67</sup> KOMPAS edisi, Selasa 21 Juni 2011. Log. Cit

Amerika Serikat dan Vietnam mengeluarkan seruan bersama tentang resolusi damai dalam penuntasan sengketa di Laut Cina Selatan. Namun, Amerika Serikat menegaskan tidak akan mengambil posisi tertentu dalam sengketa Laut Cina Selatan. McCain menegaskan, Amerika Serikat selama ini menyambut baik hubungan kerja sama dengan Republik Rakyat Cina (RRC) dan sama sekali tidak ingin mencari konflik. Akan tetapi Amerika Serikat juga mempertanyakan perilaku agresif Republik Rakyat Cina (RRC) dan klaim teritorialnya yang tidak bisa dibenarkan.<sup>68</sup>

Melihat situasi yang semakin rumit, maka ASEAN mulai bertindak dan ikut turun tangan menanggapi persoalan klaim teritorial yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan. Karena jika konflik ini tidak ditanggapi dengan serius dan dibiarkan begitu saja maka segala bentuk kerjasama di kawasan Laut Cina Selatan bisa kehilangan daya dukung dan tidak berkelanjutan selain itu juga dapat megancam keaman negara-negara ASEAN, dan sekitarnya.<sup>69</sup> Sepuluh negara anggota ASEAN sepakat mempercepat proses implementasi perilaku yang harus menjadi pegangan sejumlah negara yang terlibat sengketa Laut Cina Selatan. Yakni dengan diadakannya *Declaration on the Conduct of Parties* (DOC) yaitu hukum yang mengikat pihak-pihak yang bertikai. ASEAN juga menunjukkan keinginan untuk memulai penyusunan dan pembahasan kode etik DOC, yang kemudian akan

<sup>68</sup> KOMPAS edisi, Rabu 22 Juni 2011 *Cina tantang Vietnam Perang*. Diakses Tanggal 05 Oktober 2011

<sup>69</sup> KOMPAS edisi, Rabu 1 juni 2011 *Isu Laut Cina Selatan Harus Dituntaska*. Diakses Tanggal 10 Oktober 2011

dibahas dengan Republik Rakyat Cina (RRC) dan diterapkan di wilayah perairan itu.<sup>70</sup>

Aktor yang berperan didalamnya tidak hanya Vietnam dan Republik Rakyat Cina (RRC), tetapi juga melibatkan beberapa negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia dan Filipina, serta Taiwan. Klaim-klaim tersebut bisa berdasarkan klaim atas sejarah yang beraneka ragam, konsiderasi ekonomi, serta pertimbangan geostrategis negara-negara yang terlibat. Selain itu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dari hampir semua negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, saling tumpang tindih, sehingga menimbulkan masalah dalam penentuan batas.

#### **B. Aspek Keamanan Konflik di Laut Cina Selatan**

Kawasan Laut Cina Selatan sepanjang dekade 90-an menjadi primadona isu keamanan dalam hubungan internasional di ASEAN paska Perang Dingin. Kawasan ini merupakan wilayah cekungan laut yang dibatasi oleh negara-negara besar dan kecil seperti Republik Rakyat Cina (RRC), Vietnam, Philipina, Malaysia, Burma, dan Taiwan. Dalam cekungan laut ini terdapat kepulauan Spartly dan kepulauan Paracel. Pada berbagai kajian tentang konflik di Laut Cina Selatan kepulauan Spartly lebih mengemuka karena melibatkan beberapa negara ASEAN sekaligus, sementara kepulauan Paracel hanya melibatkan Vietnam dan Cina.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> KOMPAS edisi, Kamis 9 juni 2011. Log.Cit  
<sup>71</sup> Dr Bambang Cipto, Ma. Op.cit.hlm.203-204

Konflik di Laut Cina Selatan telah dimulai sejak akhir abad ke-19 ketika Inggris mengklaim kepulauan Sparty, diikuti oleh Cina pada awal abad ke-20 dan Prancis sekitar tahun 1930-an. Disaat berkecamuknya Perang Dunia kedua Jepang mengusir Perancis dan menggunakan Kepulauan Sparty sebagai basis kapal selam. Dengan berakhirnya Perang Dunia II Republik Rakyat Cina (RRC), Perancis kembali mengklaim kawasan tersebut dan diikuti oleh Philipina yang membutuhkan sebagian kawasan tersebut sebagai bagian dari kepentingan keamanan nasionalnya.<sup>72</sup>

Konflik yang berkembang antara Republik Rakyat Cina (RRC) dan negara-negara ASEAN lebih banyak melibatkan Philipina dan Vietnam. Kedua negara ini terlibat konflik dengan Republik Rakyat Cina (RRC) karena Republik Rakyat Cina (RRC) dengan sengaja menampakkan diri dalam perairan atau kawasan Laut Cina Selatan khususnya pada Kepulauan Spratly yang di klaim oleh Filiphina maupun Vietnam. Sementara itu, konflik Cina-Vietnam telah berlangsung sejak Republik Rakyat Cina (RRC) menyebut invasinya ke Vietnam tahun 1979 sebagai "pelajaran" yang diberikannya kepada Vietnam. Brunei, Indonesia, dan Malaysia memilih perluasan kerjasama ekonomi daripada mempersoalkan klaim wilayah masing-masing negara dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Akan tetapi pada saat yang sama Malaysia dan Indonesia memberi tempat bagi militer Amerika berupa fasilitas terbatas bagi transportasi udara dan Laut Amerika.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Ibid. Hal. 205-206

<sup>73</sup> Ibid. Hal. 176-177

Republik Rakyat Cina (RRC) pada saat itu tidak segera menyerang dan menunda penyerbuannya ke kepulauan Spratly dan baru tahun 1988 melaksanakannya, hal ini disebabkan karena beberapa hal. Beberapa faktor yang mungkin menjadi pertimbangan Republik Rakyat Cina (RRC) dalam menunda niatnya untuk menyerang wilayah itu yang *pertama* adalah, sejak akhir dasawarsa 1960-an (setelah dibubarkannya gerakan Revolusi Kebudayaan) Republik Rakyat Cina (RRC) mulai merintis jalan untuk memperbaiki citranya dalam masyarakat internasional, khususnya dalam hubungannya dengan negara-negara barat, dan karena hubungannya yang semakin memburuk dengan Uni Soviet, terutama setelah terjadi perang perbatasan tahun 1969. Perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat ditandai oleh komunike Shanghai tahun 1972 dan kemudian diikuti oleh normalisasi hubungan dengan Jepang pada bulan September 1972. Sejak itu Republik Rakyat Cina (RRC) membuka hubungan diplomatik dengan banyak negara barat.

Sementara itu hubungannya dengan negara-negara ASEAN juga meningkat. Pada tanggal 2 Juni 1974 hubungan diplomatik antara Republik Rakyat Cina (RRC) dan Malaysia diresmikan. Kemudian menyusul hubungan diplomatik dengan Filipina pada tanggal 11 Juni 1975 dan dengan Muangthai tanggal 1 Juli 1975. Perubahan kebijakan luar negeri Cina ini tampaknya menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa Kepulauan Spratly.

*Kedua*, setelah Republik Rakyat Cina (RRC) mengalami pergolakan politik di dalam negeri dan memuncak pada revolusi Kebudayaan (1966-1968) kondisi Angkatan Laut Cina sangat memperhatikan. Hal ini rupanya juga

mempengaruhi niatnya untuk melakukan penyerangan ke kepulauan Spratly. Serangannya ke pulau Paracel tahun 1974 memang dilakukan tetapi hal itu tidak berarti Angkatan Laut Cina sudah cukup kuat. Serbuan Republik Rakyat Cina (RRC) itu memanfaatkan situasi rezim Saigon (Vietnam Selatan) yang dapat dikatakan sudah hancur. Untuk menyerbu kepulauan Spratly waktu itu, jelas Republik Rakyat Cina (RRC) harus berfikir dua kali mengingat kekuatan Laut negara-negara yang juga mengklaim wilayah kepulauan Spratly seperti Taiwan, Malaysia dan Filipina, yang cukup kuat menghadapi serangan dari Republik Rakyat Cina (RRC), terlebih-lebih kalau negara-negara itu dibantu oleh negara-negara barat sekutu mereka.

*Ketiga*, setelah tahun 1975 hubungan antara Republik Rakyat Cina (RRC) dan Vietnam dapat dikatakan masih baik, sampai pada tahun 1978 ketika timbul masalah-masalah bilateral seperti pengusiran penduduk keturunan Republik Rakyat Cina (RRC), masalah perbatasan, dan invasi pasukan Vietnam ke Kampuchea yang berhasil mendepak rezim Khmer Merah dukungan Beijing. Hubungan kedua negara di perburuk dengan terjadinya invasi sekejap pasukan Republik Rakyat Cina (RRC) pada bulan maret 1979 dengan dalih memberi pelajaran. Tetapi buruknya hubungan itu ternyata tidak mendorong Republik Rakyat Cina (RRC) melakukan serbuan ke wilayah kepulauan Spratly yang diklaim Vietnam. Mungkin waktu itu dukungan Uni Soviet kepada Vietnam masih menjadi pertimbangan Republik Rakyat Cina (RRC), terutama setelah Vietnam dan Uni Soviet menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama pada tahun 1978, yang salah pasalnya (Pasal 6) menyebutkan bahwa: "apabila

salah satu pihak diserang atau diancam serangan, maka pihak-pihak yang menandatangani perjanjian akan segera berkonsultasi dengan maksud untuk menyingkirkan ancaman itu dan mengambil langkah-langkah perdakah yang efektif dan tepat guna menjamin perdamaian dan keamanan.”

Sementara itu perkembangan baru terjadi seperti membaiknya hubungan antara Republik Rakyat Cina (RRC) dan Uni Soviet . Saat ini dengan meningkatnya hubungan bilateral kedua negara rupanya Republik Rakyat Cina (RRC) ingin memanfaatkan situasi untuk melaksanakan niatnya. Ternyata setelah Republik Rakyat Cina (RRC) berhasil menduduki beberapa pulau “milik Vietnam” di kepulauan Spratly pada pertengahan bulan Maret 1988, Uni Soviet mengambil sikap tidak mendukung Vietnam, tetapi menyerukan agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan konflik teritorial itu. Hal ini dinyatakan pula oleh Wakil Menlu Uni Soviet, Igor Rogachev, di Manila Tanggal 25 Maret 1988. Setelah sekitar sepuluh tahun memebenahi Angkatan Lautnya, saat itu Cina baru mulai yakin akan kemampuannya. Menurut data *The Military Balance 1985-1986* yang di terbitkan oleh IISS, Cina sekarang ini telah menempatkan armada khusus yang ditugaskan di Laut Cina Selatan yang disebut Armada Laut Selatan disamping dua Armada lainnya yaitu Armada Utara dan Armada Timur. Kekeuatan Armada Laut Selatan ini berkekuatan 600 kapal perang termasuk 25 kapal selam, 200 kapal amphi dan beberapa jenis kapal perang lainnya.

Dengan dua perkembangan itu, Republik Rakyat Cina (RRC) tampaknya merasa mantap untuk melaksanakan niatnya merebut wilayah yang di klaimnya di Kepulauan Spratly, yaitu rencana pemerintah Filipina untuk membuat suatu

undang-undang yang akan menegaskan haknya atas Kepulauan Spratly pada akhir bulan November 1987. Hal ini segera mengundang reaksi Republik Rakyat Cina (RRC). Sejak itu Republik Rakyat Cina (RRC) mengadakan manuver Angkatan Lautnya ke kepulauan itu dan bahkan mengadakan latihan perang disana. Tindakan Republik Rakyat Cina (RRC) ini dianggap sebagai sebagai provokasi oleh Vietnam yang kemudian juga memperkuat Angkatan Lautnya sehingga terjadi insiden tanggal 14 Maret 1988. Saat itu Vietnam tidak hanya kehilangan pasukan dan kapal, tetapi juga beberapa pulau.<sup>74</sup>

Konflik di Kepulauan Spratly yang melibatkan banyak negara itu jelas mempunyai implikasi bagi keamanan regional di Asia Tenggara. Dua hal perlu diperhatikan dalam kaitan ini, yaitu: Pertama, sengketa itu melibatkan beberapa negara ASEAN, termasuk di dalamnya Filipina, dan Malaysia dan negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Republik Rakyat Cina (RRC) dan Vietnam. Dengan demikian mau tidak mau negara-negara ASEAN juga akan ikut terkena dampaknya bila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai, hal kedua adalah pentingnya kawasan Laut Cina Selatan yang bersambungan langsung dengan perairan Asia Tenggara tidak saja bagi negara-negara ASEAN, tetapi juga bagi negara-negara besar. Jalur laut di kawasan tersebut secara ekonomi sangat penting bagi negara-negara Asia Tenggara, terutama negara-negara ASEAN mengingat semakin meningkatnya hubungan dagang negara-negara ASEAN dengan Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Cina (Hongkong) dan Taiwan. Ketidakamanan wilayah itu akan mempengaruhi angkutan laut baik yang datang

<sup>74</sup> Soedjati Djiwandono *Berbagai Dimensi Konflik CSIS Jakarta 1988*. hal.315-318

dari negara-negara tersebut di atas ke negara-negara ASEAN ataupun sebaliknya.<sup>75</sup>

Dalam perkembangannya hingga saat ini tahun 2011, Republik Rakyat Cina (RRC) terlihat bertindak sangat agresif dalam mempertahankan Laut Cina Selatan. Salah satu contoh, yakni pelanggaran yang dilakukan Republik Rakyat Cina (RRC) pada tanggal 25 februari 2011, Kejadiannya sekitar 222,24 km dari pantai pulau palawan, di luar Spratly. saat itu Republik Rakyat Cina (RRC) menyerang nelayan Filiphina dengan tembakan. Selain itu diketahui Republik Rakyat Cina (RRC) juga telah mendirikan sejumlah pos terapung di wilayah yang diklaim Filiphina. tindakan Republik Rakyat Cina (RRC) ini sudah menyeleweng dari perjanjian yang disepakati di Manila tahun 2002, yang isinya menyatakan "meminta semua pihak menahan diri dan tidak menduduki area baru di kawasan yang dalam sengketa beberapa negara".<sup>76</sup>

Kejadian lain dialami oleh Vietnam, Vietnam berang setelah kapal nelayan Republik Rakyat China (RRC) mengganggu dan merusak kabel uji seismik kapal eksplorasi minyak Vietnam, Binh Minh Hanoi 2. Hanoi menyebut insiden tersebut sengaja dilakukan oleh Republik Rakyat Cina (RRC). Kecaman Vietnam justru dibalas oleh pihak Republik Rakyat China (RRC), pemerintah Republik Rakyat China (RRC) justru balik menuduh Vietnam berupaya meningkatkan eskalasi ketegangan di kawasan perairan sengketa itu. Lewat juru bicara kementerian Luar Negeri China, Hong Lei Vietnam justru di persalahkan menjadi biang keladi

<sup>75</sup> Ibid.hal.319-320

<sup>76</sup> KOMPAS edisi, Sabtu 4 Juni 2011 *Filiphina: Cina Melanggar Wilayah*. Diakses Tanggal 11 Oktober

ketegangan, katanya justru kapal nelayan milik Republik Rakyat Cina (RRC) yang menjadi korban dalam insiden ini. Mereka terjat kabel kapal milik Vietnam dan terseret selama lebih satu jam, kapal Vietnam membahayakan keselamatan kapal dan nyawa awak kapal nelayan Republik Rakyat China (RRC).

Kondisi di lapangan makin memanas diantara sejumlah negara yang mengklaim Laut Cina Selatan. Angkatan bersenjata Vietnam mengumumkan rencana mereka menggelar latihan perang dengan amunisi hidup disekitar kawasan sengketa mulai pekan depan.<sup>77</sup> Senin 13 juni 2011 lalu, angkatan laut Vietnam menggelar latihan perang menggunakan peluru tajam berlangsung sembilan jam di sekitar Hong On pulau tidak berpenghuni terletak sekitar 250 kilometer dari Paracel dan hampir 1000 kilometer dari Spratly. Sementara itu dipihak lain Filiphina mengusulkan penggantian nama Laut Cina Selatan dengan Laut Filiphina Barat, Filiphina secara resmi menggunakan nama ini sejak 1 juni. Vietnam sendiri menyebutnya dengan nama Laut Timur.<sup>78</sup>

Seolah menjadi pemilik wialyah yang sah, sebuah kapal milik Republik Rakyat China (RCC) merampas dan menyita ikan tangkapan serta perlengkapan milik nelayan Vietnam. Insiden itu terjadi hari selasa 14 juni 2011 didekat kepulauan Paracel, Laut Cina Selatan. Akibat insiden tersebut para nelayan kehilangan 500 kilogram ikan tangkapan. Dengan sejumlah peralatan nelayan yang ikut disita, kerugian diperkirakan mencapai 2.600 dollar AS. Selain itu

<sup>77</sup> KOMPAS edisi, sabtu 11 juni 2011 *Warga Vietnam Juluki China sebagai Perompak*. Diakses Tanggal 10 Oktober 2011

<sup>78</sup> KOMPAS edisi, selasa 14 juni 2011 *Vietnam Gelar Latihan, China Marah*. Diakses Tanggal 21 November 2011

Republik Rakyat China (RRC) juga bermasalah dengan sejumlah negara lain, yakni Brunei Darussalam, Malaysia, dan Taiwan.



Tindakan agresiv Republik Rakyat China (RRC) juga tampak, saat beijing menyatakan akan memperkuat armada perang angkatan laut. Selain itu Republik Rakyat Cina (RRC) juga menyebutkan akan memberangkatkan kapal patroli terbesar yang mereka miliki yakni Haixun 31 yang akan memantau kondisi Laut Cina Selatan sembari melaju ke Singapura. Diproyeksikan hingga tahun 2015 Republik Rakyat Cina (RRC) akan menggelar sedikitnya 350 kapal patroli maritim dan 16 pesawat tempur. Sementara hingga tahun 2020 jumlah kapal laut akan meningkat menjadi 520 unit. Seiring dengan meningkatnya perekonomiannya, Republik Rakyat Cina (RRC) semakin agresif mengklaim dalam wilayah Laut Cina Selatan walaupun berbenturan dengan sejumlah negara tetangga.<sup>79</sup>

Seperti yang sudah direncanakan oleh Republik Rakyat Cina (RRC) sebelumnya, Republik Rakyat Cina akhirnya memberangkatkan kapal patroli terbesar, yang mereka miliki saat ini dengan tujuan melayari dan "memantau" perairan Laut Cina Selatan sembari melaju menuju Singapura. Tidak lama setelah keluarnya kabar tersebut pada tanggal 15 juni 2011, kapal patroli maritim milik Cina, Haixun 31, berlabuh di Singapura setelah berangkat dari Cina. Dalam perjalanannya diketahui kapal itu telah melewati perairan di sekitar kepulauan Paracel dan Spartly, yang menjadi sumber sengketa di Laut Cina Selatan. Langkah seperti itu dikhawatirkan akan memperbesar potensi benturan antara

<sup>79</sup> KOMPAS edisi, sabtu 18 juni 2011 *China Makin Galak*. Diakses Tanggal 21 November 2011

negara pengklaim terutama antara Republik Rakyat Cina (RRC) dan Vietnam. Namun Republik Rakyat Cina (RRC) pekan ini menyatakan tidak akan menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan sengketa wilayah.

Sengketa dan perseteruan antara negara pengklaim menjadi semakin ramai dengan aksi saling unjuk kebolehan dan kemampuan. Berikutnya Vietnam dijadwalkan akan kembali berlatih perang, kali ini bersama Angkatan Laut Amerika Serikat. Seolah tidak mau kalah, militer Republik Rakyat Cina (RRC) juga telah mengumumkan rencana rangkaian perang lepas pantainya.<sup>80</sup>

Melihat situasi yang semakin rumit, maka ASEAN mulai ikut turun tangan dalam menanggapi persoalan klaim teritorial yang terjadi di Laut Cina Selatan. Karena jika konflik ini tidak ditanggapi secara serius dan dibiarkan begitu saja maka segala bentuk kerjasama di kawasan Laut Cina Selatan bisa kehilangan daya dukung dan tidak berkelanjutan, selain itu juga dapat mengancam keamanan negara-negara ASEAN dan sekitarnya.<sup>81</sup> Saat itu sepuluh negara anggota ASEAN sepakat mempercepat proses implementasi perilaku yang harus menjadi pegangan sejumlah negara yang terlibat sengketa Laut Cina Selatan. Yakni dengan diadakannya *Declaration on the Conduct of Parties (DOC)* yaitu hukum yang mengikat pihak-pihak yang bertikai. ASEAN juga menunjukkan keinginan untuk memulai penyusunan dan pembahasan kode etik DOC, yang kemudian akan dibahas dan diterapkan di wilayah perairan itu.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> KOMPAS edisi, Selasa 21 Juni 2011. Loc.cit

<sup>81</sup> KOMPAS edisi, Rabu 1 Juni 2011 *Isu Laut Cina Selatan Harus Dituntaskan*. Diakses Tanggal 10 Oktober 2011

<sup>82</sup> KOMPAS edisi, Kamis 9 Juni 2011. Log.cit

Mengingat persoalan sesungguhnya menyangkut isu yang sangat peka maka rangkaian workshop ini lebih difokuskan pada upaya untuk membangun kepercayaan bersama (*confidence building measure*). Oleh karena itu, pembicaraan diarahkan untuk menciptakan kerjasama dalam menangani persoalan-persoalan kolektif.

Segera berakhirnya perang dingin Indonesia memprakarsai serangkaian workshop tentang konflik di Laut Cina Selatan. Pada awal workshop ASEAN yang berpartisipasi mengingat singgungan beberapa negara ASEAN dengan negara non-ASEAN. Pada tahapan awal ini Republik Rakyat Cina (RRC) memang tidak dilibatkan walaupun semua peserta menyadari bahwa Republik Rakyat Cina (RRC) paling berpotensi dalam perkembangan konflik dikawasan tersebut. Namun pembicaraan isu yang sedemikian peka nyaris tidak mungkin berkembang tanpa melibatkan negara lain yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan. Sehingga pada workshop berikutnya Republik Rakyat Cina (RRC), Taiwan, dan Vietnam dilibatkan dengan harapan akan mempermudah pencarian titik temu dari perbedaan pendapat di antara para *claimant* di Laut Cina Selatan. Sehingga prakarsa Indonesia ini kemudian disempurnakan dengan pernyataan resmi ASEAN tahun 1992 di Manila berkaitan dengan potensi konflik laut Cina Selatan.

Dalam pertemuan Manila 1992, ASEAN mengeluarkan pernyataan yang bertujuan untuk membantu mengendalikan instabilitas kawasan tersebut. Dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa masing-masing negara yang terlibat diharapkan untuk menahan diri dan mengutamakan cara-cara damai dalam

menyelesaikan persoalan yang ada. Dalam perkembangannya ASEAN juga berhasil membujuk Republik Rakyat Cina (RRC) untuk menempatkan Konflik Laut Cina Selatan dalam agenda ARF (ASEAN Regional Forum) dan menyelenggarakan konsultasi multilateral tahunan berkaitan dengan isu-isu keamanan termasuk Konflik Laut Cina Selatan.

ARF (ASEAN Regional Forum) merupakan forum pertemuan para menteri luar negeri dari 2 negara yang terdiri dari 10 negara anggota ASEAN plus mitra dialog baik negara besar maupun negara menengah. ARF bertujuan untuk menciptakan ruang dialog dan konsultasi konstruktif bagi para partisipan masing-masing. Sesuai dengan tujuan tersebut kegiatan utama ARF adalah pengembangan tradisi *confidence-building measure* (CBM), yang diikuti dengan *preventive diplomacy* (PD), dan diharapkan kelak akan mampu mengembangkan kapasitas *conflict resolution*. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa ASEAN Regional Forum (ARF) adalah tanggapan ASEAN terhadap situasi keamanan Asia Tenggara paska-Perang Dingin.<sup>83</sup>

Bagi Republik Rakyat Cina (RRC) penyelesaian damai atas konflik di Laut Cina Selatan sangat berguna, terutama bila negara itu menghendaki suatu hubungan yang tetap baik dengan negara-negara Asia Tenggara. Sikap agresif Republik Rakyat Cina (RRC) hanya akan membuat negara-negara Asia Tenggara meninjau kembali usaha peningkatan hubungannya dengan Republik Rakyat Cina (RRC) yang selama ini dilakukan.

---

<sup>83</sup> Dr Bambang Cipto, MA. Loc.cit. hal.208-2010

Namun selama ini Vietnam sudah beberapa kali menawarkan perundingan damai kepada Republik Rakyat Cina (RRC), tetapi belum ada tanggapan positif dari pihak Republik Rakyat Cina (RRC). Mungkin invasinya ke kepulauan Spratly itu untuk menekan Vietnam dalam masalah khampuchea. Tetapi di kepulauan spratly Republik Rakyat Cina (RRC) tidak saja berhadapan dengan Vietnam, melainkan juga Malaysia dan Filipina, dan yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa hadirnya Republik Rakyat Cina (RRC) di Kepulauan Spratly itu berarti secara fisik militer Republik Rakyat Cina (RRC) hadir di kawasan Asia Tenggara. Bagi ASEAN perkembangan ini cukup memperhatikan.

Konflik Kepulauan Spratly itu memang tidak melibatkan Indonesia secara langsung. Tetapi dapat dikhawatirkan konflik itu menjalar ke wilayah Indonesia karena Indonesia sekarang ini juga menguasai beberapa kepulauan di Laut Cina Selatan seperti Kepulauan Badas, Kepulauan Tambelan, Kepulauan Natuna dan Kepulauan Anambas, yang letaknya berdekatan dengan Kepulauan Spratly. Sekarang hal itu memang belum menjadi sumber konflik. Tetapi mungkin konflik akan terjadi di masa mendatang terutama karena adanya pengaturan baru dalam Konvensi Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh banyak negara pada bulan Oktober 1982.<sup>84</sup>

Konflik di Laut Cina Selatan khususnya di kepulauan Spratly yang melibatkan banyak negara itu jelas mempunyai implikasi bagi keamanan regional di Asia Tenggara. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan ini, yaitu: Pertama, sengketa itu melibatkan beberapa negara ASEAN yaitu, Filipina,

<sup>84</sup> Soedjati Djiwandono. *Loc. cit.* hal. 321

Malaysia, Taiwan, dan Brunei darussalam, dan termasuk juga negara Asia Tenggara yaitu Cina dan Vietnam. Dengan demikian mau tidak mau negara-negara ASEAN juga akan ikut terkena dampaknya bila sengketa itu tidak dapat diselesaikan secara damai. Hal kedua adalah pentingnya kawasan Laut Cina Selatan yang bersambungan langsung dengan perairan Asia Tenggara tidak saja bagi negara-negara ASEAN, tetapi juga bagi negara-negara besar. Jalur laut di kawasan itu secara ekonomi sangat penting bagi negara-negara Asia Tenggara, terutama negara-negara ASEAN mengingat semakin meningkatnya hubungan dagang negara-negara ASEAN dengan Jepang, Korea Selatan, Cina (Hongkong) dan Taiwan. Ketidakamanan wilayah itu akan mempengaruhi angkutan laut baik yang datang dari negara-negara tersebut di atas ke negara-negara ASEAN atau sebaliknya.<sup>85</sup>

Upaya damai dalam penanggulangan konflik di Laut Cina Selatan ini harus segera dilakukan mengingat banyaknya negara yang membutuhkan stabilitas keamanan Laut Cina Selatan, bagi pertumbuhan ekonomi, dan kelancaran militernya. Dan juga peranan Laut Cina Selatan sebagai jalur pelayaran dan komunikasi internasional dimana kawasan ini juga banyak dilalui oleh kapal-kapal milik negara maju, sebagai jalur lalu lintas perdagangannya.

---

<sup>85</sup> Ibid. Hal.319-320

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kawasan Laut Cina Selatan adalah suatu kawasan yang memiliki berbagai potensi yang sangat besar, yakni berupa potensi sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam maupun kekayaan alam berupa hasil ikan yang melimpah yang terkandung di dalamnya serta potensi geografis yang dimilikinya yakni letaknya yang sangat strategis dan banyak di lalui oleh kapal-kapal milik Negara maju, sebagai jalur distribusi minyak dunia, jalur pelayaran serta komunikasi internasional. Hal ini banyak menarik perhatian Negara-negara yang masih membutuhkan energy untuk perkembangan industrialisasinya. Baik Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Kawasan Laut Cina Selatan, maupun Negara-negara besar yang mempunyai ambisi global tersendiri bagi kepentingan pribadi masing-masing Negara.

Kawasan Laut Cina Selatan merupakan salah satu yang penting bagi negara-negara yang membutuhkan energi bagi perkembangan industrialisasinya. Karena kekayaan alam yang dimilikinya serta posisinya yang strategis, sehingga banyak negara yang menginginkan kepemilikan kawasan ini. Laut Cina Selatan sebagai kawasan yang memiliki banyak potensi yang terkandung di dalamnya di satu sisi menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang sangat menguntungkan bagi negara-negara yang mempunyai kepentingan tersendiri terhadap kawasan ini, akan

tetapi di sisi lain karena besarnya potensi yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan dan banyaknya negara yang menginginkan kepemilikan kawasan ini maka kawasan Laut Cina Selatan juga mengandung potensi konflik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa insiden yang sempat terjadi di perairan Laut Cina Selatan, seperti bentrokan senjata yang terjadi antara negara-negara yang berkonflik sepanjang konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan.

Keamanan kawasan Asia Timur pasca perang Dingin melahirkan ketidakpastian strategis. Kondisi yang tidak pasti ini tentu saja mempengaruhi persepsi masing-masing negara baik yang terlibat secara langsung maupun negara-negara yang berada di kawasan tersebut tapi tidak terlibat secara langsung. Tingginya dinamika interaksi di Laut Cina Selatan menunjukkan besarnya kapabilitas ekonomi, politik, dan militer di kawasan ini. Konflik perbatasan dan klaim tumpang tindih yang terjadi di Kawasan Laut Cina Selatan masih kerap terjadi di antara Negara-negara yang berbatasan langsung dengan perairan yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki posisi yang sangat strategis, dan hal ini menjadi perdebatan antar beberapa negara-negara pengklaim kawasan tersebut. Beberapa upaya telah dilakukan dalam mengatasi konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan salah satunya yakni dengan cara diadakannya perundingan-perundingan yang melibatkan beberapa negara yang berkonflik hal ini ditujukan untuk meredam konflik yang tengah terjadi di kawasan tersebut. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan dan yang melibatkan Republik Rakyat Cina (RRC), Vietnam, Malaysia, Taiwan, Filipina, dan Brunei Darussalam ini menimbulkan implikasi-implikasi politik dan

keamanan yang diakibatkan oleh adanya pergesekan kepentingan-kepentingan di antara Negara-negara yang terlibat tersebut demi kepentingan masing-masing negara.

Apabila implikasi-implikasi tersebut dibiarkan begitu saja, dan tidak ditangani dengan cepat maka dapat tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perang terbuka, yang dapat merugikan negara-negara yang berkonflik, dan juga negara-negara yang ada di sekitar Laut Cina Selatan.

## B. Saran-saran

Kawasan Laut Cina Selatan adalah kawasan yang sudah sejak lama terguncang konflik. Ditandai dengan adanya klaim-klaim kepemilikan oleh beberapa negara yang menginginkan kawasan ini. Dengan demikian maka sangatlah penting untuk segera menuntaskan dan menangani konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan tersebut karena apabila tidak ditangani secara serius maka akan berdampak buruk bagi negara-negara yang berkonflik dan yang berada sekitar kawasan Laut Cina Selatan, maupun negara-negara luar yang memiliki kepentingan tersendiri di kawasan Laut Cina Selatan.

Dalam konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan memang rumit. Selain Cina yang mengklaim kepemilikan kawasan Laut Cina Selatan terdapat pula Taiwan dan empat negara ASEAN Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Situasi di kawasan itu sendiri sering menimbulkan ketegangan setelah terjadi perang kata-kata antara Filipina dengan Cina maupun, Vietnam dengan Cina.

Setelah menganalisis mengenai aspek politik dan keamanan konflik di Laut Cina Selatan, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan :

1. Bagi pemerintah Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN, sebaiknya memperhatikan konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan menanggapi dengan serius masalah klaim teritorial yang terjadi di Laut Cina Selatan, dapat mengambil tindakan dan melakukan penanganan secara cepat bagi konflik yang dapat membahayakan dan mengakibatkan terganggunya stabilitas kermanan, yang nantinya juga akan berpengaruh

terhadap keamanan negara-negara ASEAN, dan negara-negara yang ada disekitar Laut Cina Selatan. Selain itu juga apabila konflik ini tidak ditanggapi dengan serius dan dibiarkan begitu saja maka segala bentuk kerjasama di kawasan Laut Cina Selatan bisa kehilangan daya dukung dan tidak berkelanjutan.

2. Dengan melihat kondisi Laut Cina Selatan sebagai kawasan yang selalu terguncang konflik, sehingga sebaiknya diadakan suatu lembaga yang dapat mengatur negara-negara yang berkonflik dalam klaim kawasan Laut Cina Selatan, dimana didalamnya akan membicarakan mengenai penyelesaian secara diplomatik yang nantinya akan melibatkan negara-negara yang berkonflik dalam suatu perundingan mengenai proses penyelesaian konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan dalam mengkaji masalah-masalah, prospek, dan tantangan di kawasan Laut Cina Selatan. Dimana lembaga ini nantinya akan dapat berperan untuk membantu negara-negara yang terlibat konflik dalam pemecahan konflik di Laut Cina Selatan. Dengan diadakannya penyelesaian secara diplomatik dengan cara mempertemukan negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan dikumpulkan untuk melakukan perundingan yang nantinya akan bisa disepakati bersama dan bisa segera menuntaskan sengketa melalui aturan-aturan yang telah disepakati bersama maka hal ini diharapkan pada perkembangannya dapat berperan sebagai institusi yang membantu dalam mengatasi konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan.

3. Dalam suatu perundingan, atau pertemuan-pertemuan yang diadakan dengan melibatkan semua negara pengklaim Laut Cina Selatan, dalam perundingan tersebut dapat disarankan bagi negara-negara pengklaim untuk bersama-sama dalam memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki Laut Cina Selatan, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi geografisnya. Sehingga terjadi suatu kerja sama dalam pengelolaan potensi yang dimiliki Laut Cina Selatan secara bersama-sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Bakrie, Cornie R, 2010. *Membangun Kekuatan Sistem Pertahanan dan Postur TNI*. Dalam Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi. Jakarta: LP3ES
- Bandoro, Bantarto 2005. *Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia*. Yogyakarta: Center for strategic and Internasional Studies (CSIS).
- Banyu Perwita, Anak Agung an Y.M. Yani, 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung : Rosda Karya.
- Budiarjo, Mirriam, 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Cipto, Bambang, 2007. *Hubungan Internasional Di Asia Tenggara*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Deutsch, Karl W, 1972. *Politic and goverment: How People Decide Their Fate*. Boston: Houghton Mifflin Company
- Djafar, Zainuddin, 1990. *Study Hubungan Internasional dan Masalah-masalah Teoritisnya*. Jakarta
- Djiwandono, Soedjati, 1988. *Berbagai Dimensi Konflik*. Jakarta: Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS).
- Frankel, Joseph, 1990. *Hubungan Internasional*. Jakarta: ANS Sungguh Bersaudara.
- Hermawan, Yulius P, 2007. *Transformasi dalam Study Hubungan Internasional: Aktor Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Holsti K.J, 1988. *Politik Internasional Kerangka untuk Analisis, Edisi keempat jilid 2*. Terjemahan: M. Tahir Azhary, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Miall, Hug, 1999. *Resolusi Damai Konflik Kontenporer: menyelesaikan, mencegah, mengelola, dan mengubah konflik bersumber politik, sosial, agama, dan ras*. Terjemahan Tri Budhi Satrio. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mitchel, Joyce M and William C. 1969. *Political Analysis and Public Policy: An Introduction to Political Sciens*. Chicago: Rand Me Nally

Morgenthau, Hans J, 1990. *Politik antar Bangsa*. Terjemahan S. Maimoen.  
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Plano, Jack C (et.al), 1985. *Kamus Analisa Politik*. Terjemahan S Siregar. Jakarta:  
CV. Rajawali

#### Internet :

- "Diplomasi Asean dalam Upaya Menyelesaikan Konflik"  
<http://sahidpram.posterous.com/diplomasi-asean-dalam-upaya-menyelesaikan-kon>. Diakses tanggal 24 Mai 2009
- "Keamanan Nasional" wikipedia.  
<http://id.wikipedia.org/wiki/KeamananInternasional>. Diakses tanggal 20 November 2011
- "Konflik Laut Cina Selatan"  
<http://ijournal.webs.com/apps./blog/show/4113964.html>. Diakses tanggal 05 Oktober 2011
- "Konflik Laut Cina Selatan" [Johnphau.com/2010/11/09/91htm](http://Johnphau.com/2010/11/09/91htm). Diakses tanggal 09 November 2010
- "Konflik Laut Cina Selatan Ganggu Sumber Perikanan"  
<http://www.antaraneews.com/berita/284379/konflik-laut-china-selatan-ganggu-sumber-perikanan>. Diakses tanggal 16 Jan 2012
- "Laut Cina Selatan" [www.annahira.com/laut-cina-selatan.htm](http://www.annahira.com/laut-cina-selatan.htm). Diakses tanggal 25 Juni 2010
- "Laut Cina Selatan Bukan Pepesan Kosong"  
<http://www.detiknews.com/read/2011/07/04/111551/1673799/471.html>.  
Diakses tanggal 05 Oktober 2011
- "Mencermati Sengketa Teritorial Laut Cina Selatan"  
<http://judiono.com/2009/01/05/mencermati-sengketa-laut-cina-selatan/htm>.  
Diakses tanggal 05 Januari 2011
- "Potensi Konflik di Laut Cina Selatan" <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/115-november-2010/980-potensi-konflik-dikawasan-laut-cina-selatan.Bandung>. Diakses tanggal 1-november-2010-lua.html. Diakses tanggal 25 Juni 2010

“Sengketa Kepemilikan Kawasan Laut Cina Selatan”

[http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan\\_khusus/2011/07/110719\\_spratlyc\\_onflict.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyc_onflict.shtml). Diakses tanggal 16 Jan 2012

**Surat Kabar :**

KOMPAS edisi, Rabu 1 Juni 2011 *Isu Laut Cina Selatan Harus Dituntaskan*.  
Diakses tanggal 10 Oktober 2011

KOMPAS edisi, Sabtu 4 Juni 2011 *Filiphina: Cina Melanggar Wilayah*. Diakses  
tanggal 11 Oktober 2011

KOMPAS edisi, Kamis 9 Juni 2011 *Laut Cina Selatan Dibahas*. Diakses tanggal  
11 Oktober 2011

KOMPAS edisi, Sabtu 11 Juni 2011 *Warga Vietnam Juluki China sebagai  
Perompak*. Diakses tanggal 10 Oktober 2011

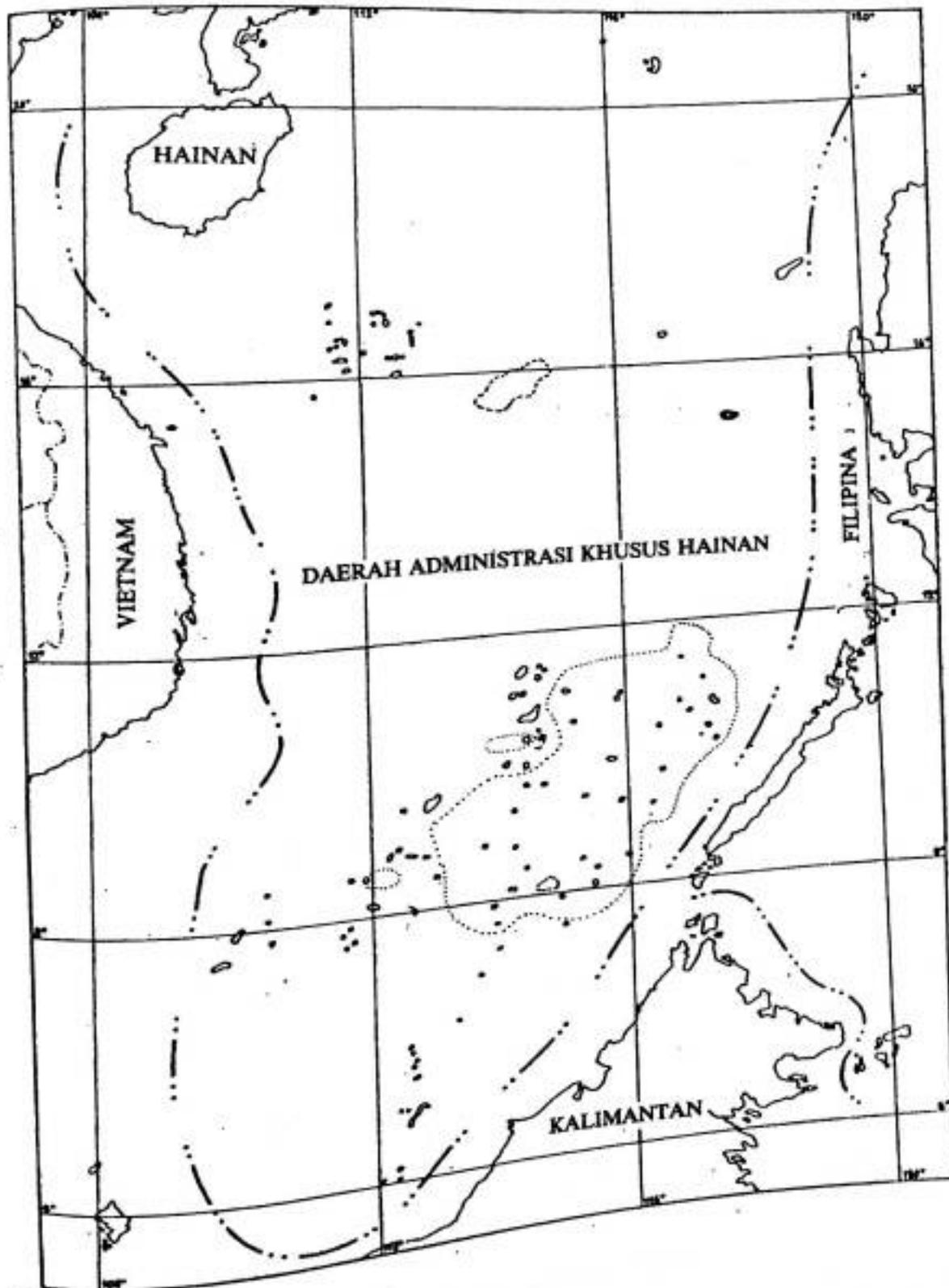
KOMPAS edisi, Selasa 14 Juni 2011 *Vietnam Gelar Latihan, China Marah*.  
Diakses tanggal 21 November 2011

KOMPAS edisi, Sabtu 18 Juni 2011 *China Makin Galak*. Diakses tanggal 21  
November 2011

KOMPAS edisi, Selasa 21 Juni 2011 *Singapura Desak Cina Jelaskan Klaim*.  
Diakses tanggal 21 November 2011

KOMPAS edisi, Rabu 22 Juni 2011 *Cina Tantang Vietnam Perang*. Diakses  
tanggal 05 Oktober 2011

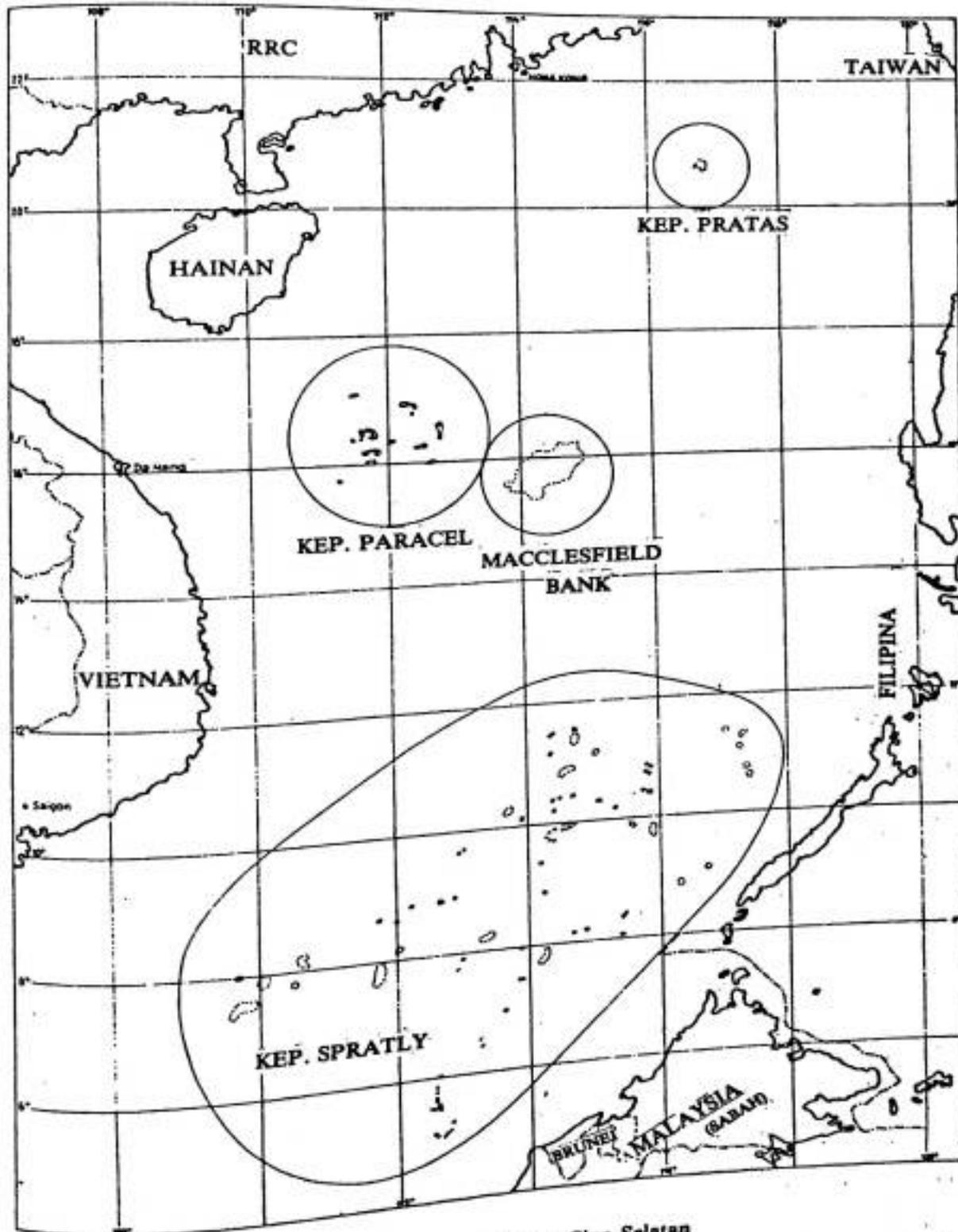
Peta 1



--- Klaim Republik Rakyat Cina

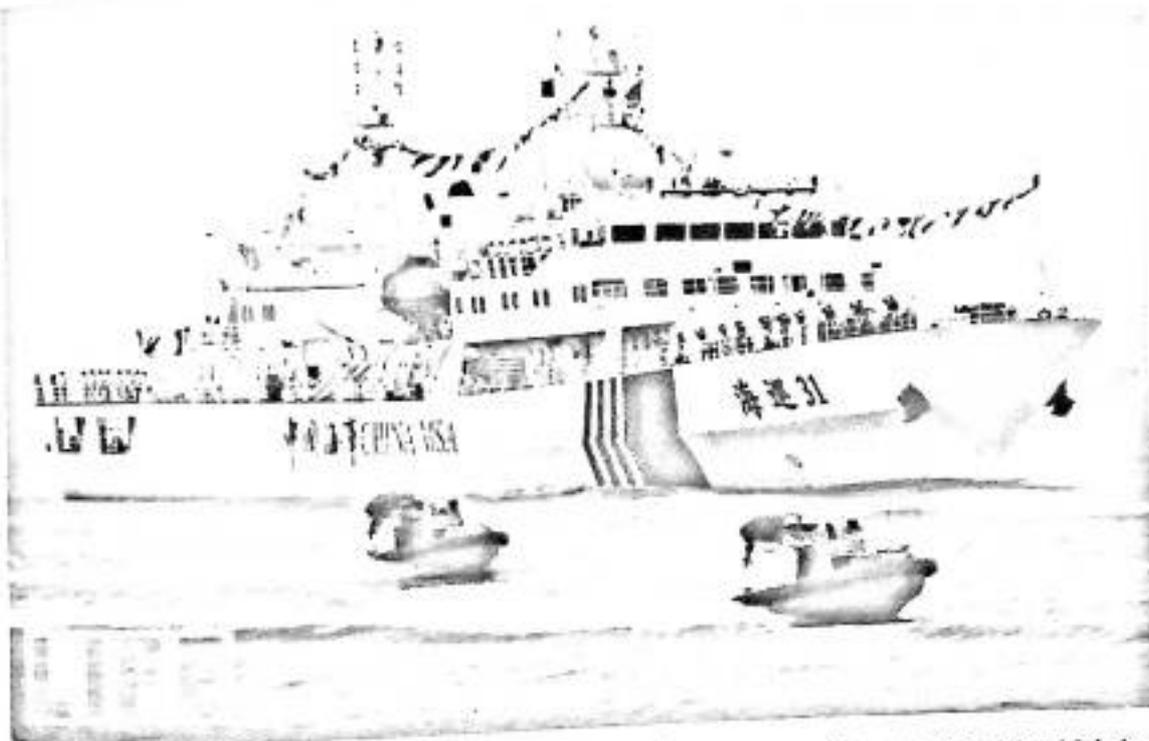
KONFLIK DI LAUT CINA SELATAN

Peta 2



Kepulauan-kepulauan yang Dipersengketakan di Laut Cina Selatan

Gambar Kapal Patroli terbesar Republik Rakyat Cina *Haixun 31*

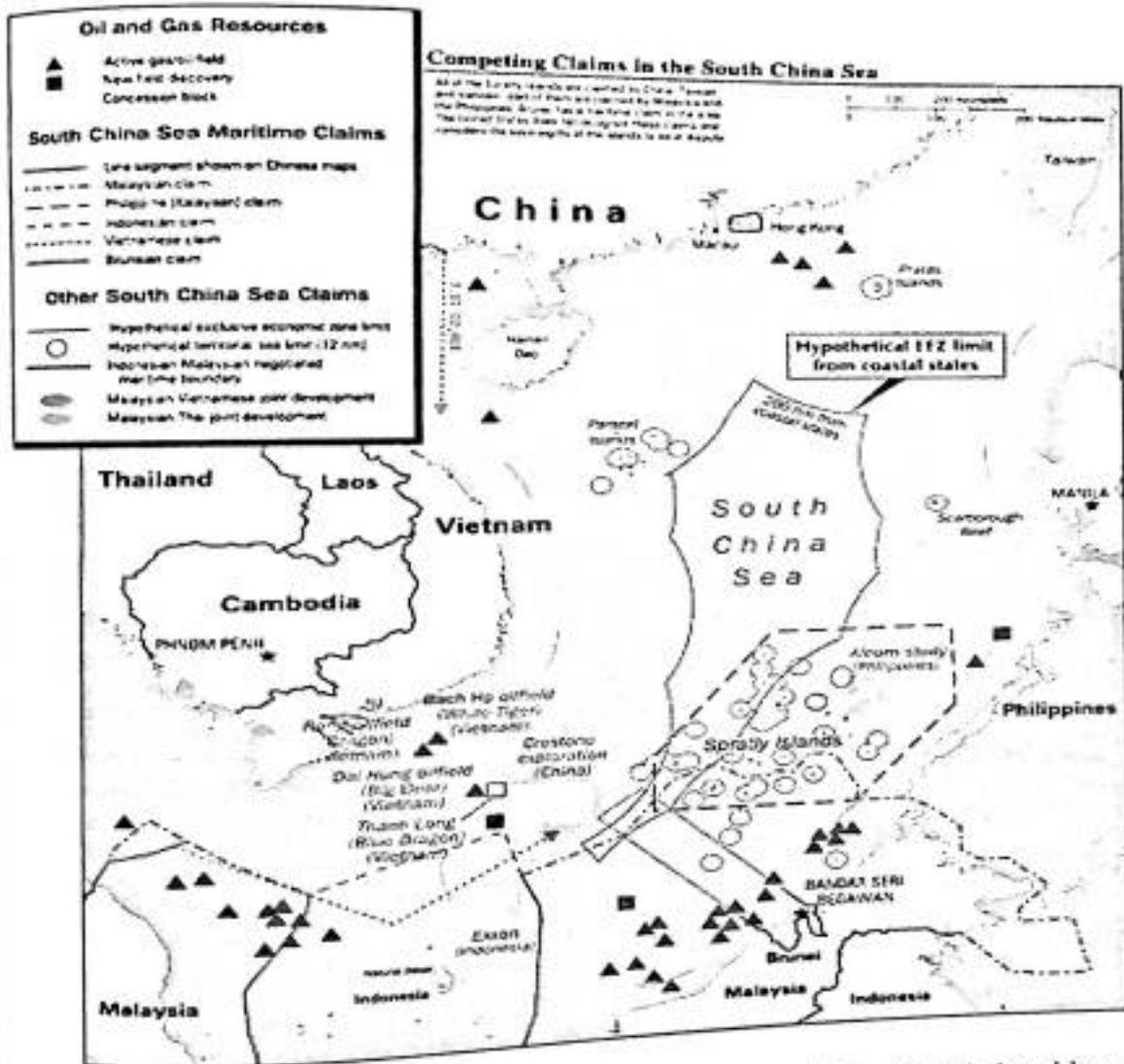


Kapal patroli Cina menuju Laut sengketa, Kapal patroli Haixun 31 meninggalkan Laut Cina. Kapal ini akan lewat di dekat kelompok Pulau Paracel dan Spratly, yang merupakan jantung perselisihan dengan Vietnam, Filipina, dan negara lainnya.



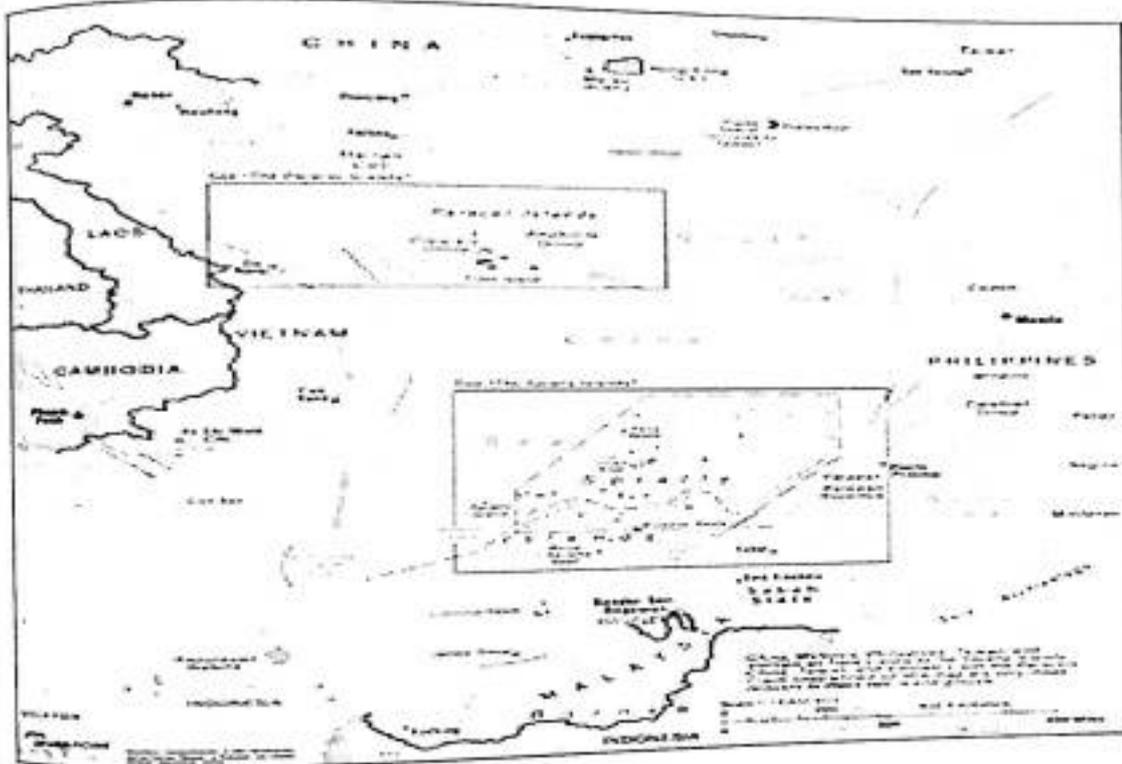
China mengirimkan kapal patroli terbesarnya ke Laut China Selatan. Kapal patroli China di Laut China Selatan pergi menuju Singapura dan melewati kepulauan yang menjadi sengketanya dengan Vietnam dan Filipina. Tindakan ini dinilai akan meningkatkan tegangan di negara sekitar tetangganya yang juga mengklaim perairan Laut China Selatan.

Gambar Peta Laut Cina Selatan



Laut Cina Selatan adalah jalur strategis yang banyak di lewati oleh kapal-kapal tengker maupun kapal milik negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang.

Gambar Peta Laut Cina Selatan



Gambar kepulauan Paracel dan Spratly



Gambar Wilayah yang di klaim oleh Cina (Tanda garis putus-putus berbentuk huruf U)